

**KERJA SAMA KEAMANAN INDONESIA-AUSTRALIA DALAM
DEFENCE COOPERATION AGREEMENT TAHUN 2021 - 2024**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

DHIYA SYAUQIY PUTRA ANANDA

21323271

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2026

**KERJA SAMA KEAMANAN INDONESIA-AUSTRALIA DALAM
DEFENCE COOPERATION AGREEMENT TAHUN 2021 - 2024**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

DHIYA SYAUQIY PUTRA ANANDA

21323271

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2026**

HALAMAN PENGESAHAN

KERJA SAMA KEAMANAN INDONESIA-AUSTRALIA DALAM
DEFENCE COOPERATION AGREEMENT TAHUN 2021 - 2024

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Pada Tanggal

12 Juni 2026

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Ketua Program Studi



Karina Utami Dewi, S.I.P., MA.

Dewan Penguji

- 1 Hangga Fathana, S.I.P., B.Int.St., M.A.
- 2 Elyana Ade Pertiwi, S.Hub.Int., M.A.
- 3 Khairul Munzilin, S.IP., M.A.

Tanda Tangan

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 27 April 2026



Dhiya Syauqiy Putra Ananda

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik dan lancar. Karya ini disusun sebagai bagian dari upaya untuk memperdalam pemahaman terhadap KERJA SAMA KEAMANAN INDONESIA-AUSTRALIA DALAM DEFENCE COOPERATION AGREEMENT TAHUN 2021 - 2024, serta memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana di Prodi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia.

Saya menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, penyusunan karya ini tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya terhadap kemudahan saya dalam mengerjakan skripsi ini.
2. Kepada seluruh dosen Prodi Hubungan internasional yang memberikan saya seluruh ilmu sehingga saya bisa sampai pada titik ini.
3. Ibu Karina Utami Dewi, S.I.P., MA. selaku Kaprodi Hubungan Internasional.
4. Bapak Hangga Fathana, S.I.P., B.Int.St., M.A. selaku dosen pembimbing saya yang sudah memberikan dukungan serta bantuan terhadap saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Keluarga saya, ayah, ibu, dan adek selaku pilar utama yang memberikan dukungan kepada saya dalam penulisan ini.

6. Teman-teman Dayatholic, yang telah menemani dan mengajarkan penulis saat masa kuliah dari awal hingga akhir, terimakasih atas memori yang berkesan.
7. Terimakasih untuk warga kost tentrem yang memberikan pengalaman dan memori yang bagus.
8. Terimakasih untuk diri saya, Dhiya Syauqiy Putra Ananda untuk sudah bertahan sejauh ini dan selalu semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
9. Dan terimakasih untuk Jogja dengan segala memori yang berkesan di setiap sudutnya.
10. Dan yang terakhir, terimakasih banyak kepada NIM 21323198 yang sudah lulus atas support nya dan pengertian selalu. terimakasih sudah menjadi support system nomor 1, terimakasih sudah menemani penulis dari awal hingga akhir. terimakasih sebanyak-banyaknya untuk anda.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
ABSTRAK	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Cakupan penelitian	8
1.5 Tinjauan Pustaka	9
1.6 Kerangka Pemikiran	12
1.7 Argumen Sementara	18
1.8 Metode Penelitian	18
<i>1.8.1 Jenis Penelitian</i>	19
<i>1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian</i>	19
<i>1.8.3 Metode Pengumpulan Data</i>	19
<i>1.8.4 Proses Penelitian</i>	20
1.9 Sistematika Pembahasan	20
BAB 2 KERJA SAMA KEAMANAN INDONESIA - AUSTRALIA	21
2.1. Perjanjian Keamanan Indonesia dan Australia	21
2.2. Lombok Treaty 2006	24
2.3. Dinamika Kerja Sama Keamanan Indonesia Australia 2021–2024	27
2.4. DCA sebagai Kerangka Kerja Sama Keamanan Indonesia Australia 2025	32
BAB 3 ANALISIS KERJA SAMA KEAMANAN INDONESIA AUSTRALIA DALAM DEFENCE COOPERATION AGREEMENT	37
3.1. Level Internasional dan Domestik Indonesia Dalam DCA	37

3.2. Level Internasional dan Domestik Australia dalam DCA	47
BAB 4 PENUTUP	59
4.1. Kesimpulan	59
4.2 Rekomendasi	61
DAFTAR PUSTAKA	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pemetaan Win-set teori Two level games	16
Gambar 3.2 Pemetaan Win-Set Indonesia dalam DCA Indonesia Australia 2021–2024	46
Gambar 3.3 Pemetaan Win-Set Australia dalam DCA Indonesia Australia 2021–2024	58

ABSTRAK

Penelitian ini membahas kerja sama keamanan Indonesia dan Australia melalui Defence Cooperation Agreement (DCA) pada periode 2021–2024. Penelitian bertujuan untuk menjelaskan alasan kedua negara memperkuat kerja sama pertahanan serta menganalisis proses negosiasi sebelum tercapainya kesepakatan DCA. Penelitian ini menggunakan teori Two-Level Games Robert Putnam untuk melihat hubungan antara kepentingan internasional dan tekanan politik domestik dalam kerja sama pertahanan kedua negara. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DCA menjadi instrumen strategis bagi Indonesia dan Australia untuk meningkatkan interoperabilitas militer, kerja sama keamanan maritim, pertukaran intelijen, serta menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Pada level internasional, kedua negara memiliki kepentingan bersama dalam menghadapi ancaman keamanan kawasan. Sementara pada level domestik, Indonesia tetap menjaga prinsip politik luar negeri bebas aktif dan kedaulatan nasional. Dengan demikian, keberhasilan DCA dipengaruhi oleh kemampuan kedua negara menyesuaikan kepentingan internasional dengan kondisi politik domestik masing-masing.

Kata-kata kunci: Defence Cooperation Agreement, Indonesia, Australia, kerja sama keamanan, Two-Level Games

ABSTRACT

This research discusses the security cooperation between Indonesia and Australia through the Defence Cooperation Agreement (DCA) during 2021–2024. The study aims to explain the reasons behind the strengthening of defense cooperation and to analyze the negotiation process before the agreement was achieved. This research uses Robert Putnam's Two-Level Games theory to examine the interaction between international interests and domestic political pressures in the defense cooperation between the two countries. This research applies a qualitative method with a descriptive approach through library research. The findings show that the DCA serves as a strategic instrument for Indonesia and Australia to enhance military interoperability, maritime security cooperation, intelligence sharing, and regional stability in the Indo-Pacific. At the international level, both countries share common interests in addressing regional security challenges. Meanwhile, at the domestic level, Indonesia continues to maintain its free and active foreign policy principle and national sovereignty. Therefore, the success of the DCA depends on the ability of both countries to balance international interests with domestic political conditions.

Keywords: Defence Cooperation Agreement, Indonesia, Australia, security cooperation, Two-Level Games

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kerja sama internasional pada dasarnya adalah hubungan kerja sama antara dua atau lebih negara berdaulat (Banyu Perwira 2017). Menurut Dougherty dan Pfaltzgraff, kerja sama internasional adalah sebuah hubungan yang dibentuk antar negara yang dilegalkan oleh hukum internasional dan berusaha untuk memberikan kebebasan kepada mereka untuk mengembangkan negaranya masing-masing tanpa menggunakan paksaan atau kekerasan (Dougherty and Pfaltzgraff 1997). Setiap negara mendapat manfaat dari jenis kerja sama ini dengan negara lain. Negara-negara ini bekerja sama di sejumlah bidang, termasuk politik, ekonomi, teknologi, budaya, keamanan, dan lingkungan. Tujuan dari kerja sama ini adalah untuk mengatasi isu-isu global, memajukan kepentingan bersama, dan meningkatkan hubungan antar negara.

Upaya badan nasional dan internasional untuk menegakkan keselamatan dan keamanan negara-negara di dunia disebut sebagai keamanan internasional. Inisiatif ini bertujuan untuk melindungi individu dan cara hidup mereka dengan mencegah dan mengelola konflik. Tindakan militer, pemeliharaan perdamaian, pengembangan kapasitas, komunikasi dengan sekutu penting, dan perjanjian diplomatik termasuk perjanjian dan konvensi adalah beberapa langkah yang dilakukan untuk menjaga keamanan internasional. Negara-negara yang bekerja sama untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan keamanan regional atau global dikenal sebagai kerja sama keamanan internasional. Selain menangani bahaya bersama seperti terorisme, kejahatan transnasional, perdagangan senjata ilegal,

dan keamanan siber, kerja sama ini juga mencakup upaya kerja sama untuk mencegah, mengelola, dan menyelesaikan konflik.

Karena kepentingan bersama dalam menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan Asia Pasifik, Indonesia dan Australia telah meningkatkan kerja sama keamanan internasional dalam beberapa dekade terakhir. Terlepas dari konflik ketegangan, terutama dalam hal imigrasi, perbatasan, dan politik dalam negeri, kedua negara memiliki sejarah panjang hubungan bilateral yang solid. Dalam hal keamanan, Indonesia dan Australia bekerja sama dalam berbagai bidang, seperti penegakan hukum, keamanan laut, dan kontra terorisme. Memerangi terorisme telah menjadi prioritas utama, terutama setelah peristiwa Bom Bali pada tahun 2002, ketika Australia membantu Indonesia dengan memberikan pelatihan, pertukaran informasi intelijen, dan mendukung fasilitas pelatihan seperti Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC).

Patroli bersama untuk memerangi narkoba dan perdagangan manusia serta penangkapan ikan ilegal di laut perbatasan adalah contoh lain dari kerja sama keamanan maritim. Untuk meningkatkan kemampuan angkatan bersenjata kedua negara dalam berkomunikasi satu sama lain, latihan militer bersama secara rutin juga diadakan. Perjanjian Lombok, yang ditandatangani pada tahun 2006, membentuk kerangka kerja untuk kerja sama pertahanan yang lebih luas di tingkat kebijakan. Secara keseluruhan, Indonesia dan Australia terus menjadi aliansi yang solid dalam menjaga keamanan dan stabilitas regional, meskipun kerja sama keamanan ini secara berkala mengalami kesulitan diplomatik, seperti perbedaan pendapat tentang kebijakan pencari suaka.

Australia dan Indonesia telah membuat kemajuan yang signifikan dalam kerja sama keamanan internasional terkait pertahanan, terorisme, dan keamanan maritim. Kedua negara telah berkolaborasi dalam patroli keamanan laut untuk memerangi penangkapan ikan ilegal, perdagangan narkoba, dan penyelundupan manusia di perairan perbatasan. Australia dan Indonesia berkolaborasi dalam latihan pertahanan seperti Pitch Black dan Garuda Shield. Secara berkala, latihan-latihan ini dilakukan untuk meningkatkan interoperabilitas militer dan kemitraan pertahanan antara Australia dan Indonesia. Australian Federal Police (AFP) adalah lembaga penegak hukum lain yang bekerja bersama Polri untuk menjaga keamanan, memerangi kejahatan lintas negara termasuk perdagangan narkoba dan kejahatan siber, serta mendukung tentara untuk menjaga stabilitas regional. Setelah peristiwa Bom Bali pada tahun 2002, Indonesia dan Australia meningkatkan upaya mereka untuk memberantas terorisme.

Dengan bertukar pelatihan kontraterorisme, memasok informasi intelijen, dan membangun Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation (JCLEC) di Semarang. Australia sepenuhnya mendukung fasilitas pelatihan pasukan keamanan ini. Salah satu inisiatif diplomatik antara kedua negara untuk meningkatkan keamanan masing-masing sambil bekerja untuk mencapai kepentingan bersama adalah Perjanjian Kerja Sama Pertahanan (DCA). Kedua negara telah menunjukkan komitmen yang serius untuk meningkatkan dan memperkuat kerja sama pertahanan dalam kerangka kemitraan strategis yang komprehensif dengan menandatangani Defence Cooperation Agreement (DCA) yang mengikat secara hukum. Peningkatan kegiatan kerja sama militer antara kedua negara selama sepuluh tahun terakhir, khususnya di bidang pendidikan dan

pelatihan, menjadi dasar pertimbangan peningkatan status Defence Cooperation Agreement (DCA) menjadi perjanjian yang mengikat secara hukum. Rencana Misi Bersama TNI dan ADF di PBB, pengiriman taruna TNI untuk belajar di Australian Defence Forces Academy (ADFA) dan Royal Military College duntroon, dan peningkatan intensitas Latihan Bersama (LATMA) antar matra dan gabungan tiga matra dari kedua negara merupakan beberapa contohnya (Kemhan 2024).

Pertemuan antara pejabat pertahanan Australia dan Indonesia pada bulan Agustus dan September 2021 menghasilkan tiga nota kesepahaman (MOU) tentang kontraterorisme, keamanan siber, dan kolaborasi dengan negara-negara kepulauan Pasifik. Selain itu, para pejabat dari kedua negara memutuskan untuk memperkuat kolaborasi pertahanan mereka saat ini di bidang tanggap bencana, pemeliharaan perdamaian, pendidikan dan pelatihan, dan sektor pertahanan. Menyusul pertemuan antara Menteri Pertahanan Australia Peter Dutton dan Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto di Jakarta pada tanggal 9 September, kedua pemerintah, sebagai mitra strategis yang mencakup semuanya, juga menegaskan kembali komitmen bersama mereka terhadap hukum internasional, terutama yang berkaitan dengan perselisihan di Laut Cina Selatan. Keduanya bertemu "untuk membahas upaya meningkatkan kerja sama pertahanan antara kedua negara". Menurut Kementerian Pertahanan, kolaborasi bilateral ini telah secara signifikan meningkatkan kemampuan pertahanan Indonesia yang sedang berkembang.

Menurut Prabowo Subianto, diskusi yang dilakukan mencakup potensi peserta pelatihan TNI untuk menghadiri akademi militer Australia dan

kemungkinan pelatihan militer bersama di Australia. Tanggapan Angkatan Laut Australia terhadap tragedi tenggelamnya kapal selam Indonesia KRI Nanggala-402 pada April 2021 dan upaya angkatan laut kedua negara untuk menyelamatkan 19 nelayan Indonesia yang perahunya tenggelam di perairan 650 mil sebelah barat daya Perth, Australia, pada Mei 2021 juga menjadi salah satu topik yang dibahas (Indo-Pacific Defence Forum 2021).

Pertemuan ini menghasilkan sejumlah kemajuan penting bagi hubungan kedua negara. Penguatan kerja sama pertahanan dalam melawan terorisme dan ekstremisme, meningkatkan kerja sama keamanan siber, memperbarui Pengaturan Kerja Sama Pertahanan (DCA), dan memberikan akses kepada taruna Indonesia ke akademi militer Australia untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan merupakan beberapa kesepakatan yang dicapai. Australia akan melatih taruna Indonesia untuk pertama kalinya dalam sejarah kerja sama kedua negara (Rizki 2021). Menteri Pertahanan Australia dan Indonesia juga membahas evolusi situasi keamanan regional dan internasional di antara mereka selama pertemuan tersebut. Menurut Menteri Pertahanan Indonesia, kerja sama pertahanan kedua negara terus berkembang setiap tahun. Seperti halnya hubungan bilateral lainnya, kerja sama pertahanan antara kedua negara telah tumbuh lebih kuat selama lebih dari 50 tahun. Dalam banyak hal, kerja sama ini sangat bermanfaat dan menguntungkan bagi kedua negara (Kemhan 2021).

Defence Cooperation Agreement (DCA) adalah perjanjian hukum yang berupaya meningkatkan kerja sama pertahanan dan keamanan antara dua negara atau lebih. Melalui operasi keamanan kooperatif, berbagi informasi, dan latihan bersama, DCA berupaya meningkatkan hubungan antara pasukan militer kedua

negara. DCA antara Australia dan Indonesia merupakan perpanjangan dari kerja sama sebelumnya. Setelah melalui negosiasi yang ekstensif, DCA antara Indonesia dan Australia secara resmi ditandatangani pada 2012. Perjanjian ini berisi sejumlah langkah yang bertujuan untuk memperkuat hubungan bilateral secara umum dan meningkatkan kemampuan pertahanan dan keamanan.

Selain itu, DCA memiliki signifikansi penting baik dalam konteks hubungan bilateral maupun keamanan kawasan. DCA tidak hanya menjadi instrumen untuk memperkuat hubungan pertahanan Indonesia dan Australia, tetapi juga mencerminkan upaya kedua negara dalam merespons perubahan lingkungan strategis yang semakin dinamis. Dalam pernyataan bersama Menteri Pertahanan Indonesia dan Australia, kedua negara menegaskan komitmen bersama untuk mewujudkan kawasan yang damai, stabil, aman, dan sejahtera dengan tetap menghormati kedaulatan negara. Kesepakatan tersebut juga dirancang untuk memperdalam dialog pertahanan, memperkuat interoperabilitas militer, serta meningkatkan kerja sama praktis yang memberikan manfaat bagi kedua negara. Oleh karena itu, DCA menjadi kasus yang relevan untuk memahami bagaimana kepentingan keamanan regional dan kepentingan domestik masing-masing negara dapat dipertemukan dalam suatu kesepakatan pertahanan bilateral (Marles 2024).

Perkembangan lingkungan strategis di kawasan Indo-Pasifik dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan kompleksitas tantangan keamanan yang dihadapi negara-negara kawasan. Rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang semakin intensif, meningkatnya ketegangan di Laut Cina Selatan, serta pembentukan kemitraan keamanan Australia, United

Kingdom, dan United States (AUKUS) pada tahun 2021 telah mengubah konfigurasi keamanan regional secara signifikan. Perubahan tersebut mendorong berbagai negara untuk memperkuat kerja sama pertahanan sebagai upaya menjaga stabilitas kawasan dan mengantisipasi berbagai ancaman keamanan yang berkembang. Dalam konteks ini, Indonesia dan Australia sebagai dua negara yang memiliki posisi strategis di kawasan Indo-Pasifik turut meningkatkan kerja sama pertahanan melalui penandatanganan DCA pada tahun 2024. Perjanjian tersebut menjadi salah satu bentuk penguatan hubungan pertahanan yang paling signifikan sejak Perjanjian Lombok 2006 karena memperluas kerja sama pada bidang interoperabilitas militer, keamanan maritim, pendidikan dan pelatihan, serta dukungan logistik pertahanan. (Marles and Subianto 2024).

Indonesia secara konsisten menerapkan politik luar negeri bebas aktif yang menekankan independensi dalam menentukan kebijakan luar negeri serta menghindari keterikatan pada aliansi militer tertentu. Sebaliknya, Australia merupakan salah satu sekutu utama Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik dan terlibat dalam kemitraan keamanan AUKUS yang dibentuk untuk memperdalam kerja sama pertahanan dan teknologi keamanan antara Australia, Amerika Serikat, dan Inggris. Perbedaan orientasi strategis tersebut menunjukkan adanya kondisi yang tampak kontradiktif karena Indonesia yang berupaya menjaga otonomi strategis justru menyepakati kerja sama pertahanan yang lebih mendalam dengan Australia melalui DCA. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana kedua negara dapat mencapai kesepakatan kerja sama pertahanan yang lebih erat meskipun memiliki posisi strategis dan pendekatan keamanan yang berbeda dalam memandang dinamika kawasan Indo-Pasifik (Medcalf 2020).

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Indonesia dan Australia membuat kesepakatan kerja sama keamanan melalui Defence Cooperation Agreement (DCA) Tahun 2025?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan peran Defence Cooperation Agreement (DCA) dalam kerja sama keamanan Indonesia dan Australia.
2. Untuk menganalisis proses sebelum terjadinya persetujuan kerja sama keamanan Indonesia dan Australia dalam Defence Cooperation Agreement (DCA).

1.4 Cakupan penelitian

Cakupan penelitian ini, berfokus pada proses sebelum terjadinya penandatanganan persetujuan DCA antara Indonesia dan Australia. Dengan masalah yang ada antara Indonesia dan Australia sebelum adanya kesepakatan DCA tersebut, kedua negara memiliki tujuan untuk mempererat hubungan kerja sama dan juga memperkuat pertahanan antar kedua negara. Penelitian ini memiliki waktu dari sebelum penandatanganan perjanjian DCA yaitu 2021 sampai penandatanganan perjanjian DCA yaitu 2024.

Rentan waktu ini ditetapkan sebagai prioritas untuk meningkatkan kerja sama pertahanan dan keamanan di antara kedua negara. Era baru kerja sama pertahanan dimulai pada masa ini, dengan fokus pada pengembangan kapasitas dan modernisasi. Kebutuhan untuk mengatasi masalah keamanan yang berubah,

seperti masalah Laut Cina Selatan, ancaman terorisme dan juga ancaman dari aliansi AUKUS. Maka dari itu Indonesia dan Australia menjalin hubungan bilateral dalam bidang keamanan dengan penandatanganan persetujuan DCA.

1.5 Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka yang pertama saya ambil berasal dari jurnal artikel dengan judul "Kepentingan Indonesia dalam Kerja Sama Pertahanan dengan Prancis Tahun 2020-2024" yang ditulis oleh Artha Setya Anggara (Artha Setya Anggara 2024). Jurnal artikel ini membahas pentingnya kerja sama pertahanan Prancis-Indonesia dalam konteks globalisasi. Melalui metode kolaborasi internasional, termasuk dengan Prancis, Indonesia bertujuan untuk mempertahankan kedaulatan nasional di era yang semakin kompleks. DCA yang ditandatangani pada tahun 2020 menandai dimulainya kerja sama ini dan bertujuan untuk meningkatkan posisi Indonesia di ASEAN dan Indo-Pasifik. Akuisisi jet tempur Dassault Rafale yang memasuki tahap ketiga pada tahun 2024 merupakan salah satu hasil konkret dari kerja sama ini. Untuk menganalisis kepentingan nasional Indonesia, termasuk peningkatan kapasitas industri pertahanan melalui transfer teknologi dan pengetahuan.

Jurnal artikel ini juga membahas evolusi kolaborasi di sejumlah bidang, termasuk pertahanan, dan sejarah hubungan bilateral antara Prancis dan Indonesia, yang telah terjalin sejak tahun 1950. Indonesia berdedikasi untuk memodernisasi kekuatan pertahanannya melalui implementasi program Minimum Essential Force (MEF). Kolaborasi dengan Prancis diharapkan dapat membantu memenuhi tujuan MEF, yang menyerukan untuk meningkatkan sektor pertahanan dalam negeri dan mengakuisisi alutsista. Artikel ini juga menjelaskan bagaimana kolaborasi ini

membantu Indonesia tidak hanya dalam pembelian peralatan militer, tetapi juga dalam pelatihan dan pendidikan bagi personil militer Indonesia. Dan juga dinamika kerja sama pertahanan Indonesia-Prancis serta implikasinya bagi stabilitas regional.

Tinjauan kedua yang saya ambil berasal dari jurnal artikel dengan judul “Pengaruh Penandatanganan Defence Cooperation Agreement (DCA) oleh pemerintah Indonesia dengan Prancis terhadap perkembangan industri pertahanan di Indonesia” yang dibuat oleh Nugraheni Indrawati (Nugraheni 2023). Jurnal ini menjelaskan terkait DCA, yang ditandatangani Perancis dan Indonesia pada 28 Juni 2021, merupakan tonggak penting dalam pertumbuhan sektor pertahanan Indonesia. Selain menyediakan kerangka kerja untuk kerja sama pertahanan, DCA berperan sebagai katalisator untuk kemajuan sektor pertahanan dalam negeri.

Melalui kesepakatan ini, Indonesia berharap dapat memperkuat hubungannya dengan Perancis di sektor pertahanan dan pengembangan teknologi, selain membeli perangkat keras militer dari Perancis, DCA diantisipasi untuk membantu Indonesia dalam mencapai otonomi strategis di sektor militernya melalui penelitian dan pengembangan inovasi, peningkatan kapasitas produksi, dan transfer teknologi. Terlepas dari kesulitan-kesulitan yang ada, dedikasi kedua negara untuk berkolaborasi secara erat memberikan optimisme bagi sektor pertahanan Indonesia untuk masa depan yang lebih mandiri dan kompetitif secara global.

Tinjauan terakhir yaitu tinjauan ketiga yang saya ambil berasal dari jurnal artikel dengan judul “Kerja sama Indonesia dengan Amerika Serikat dalam peningkatan pertahanan udara nasional Indonesia” yang dibuat oleh Andi

Sahputra, Windy Dermawan, dan Anggia Utami Dewi (Sahputra 2024). dalam jurnal ini menjelaskan Langkah strategis untuk meningkatkan kemampuan TNI AU dalam menegakkan kedaulatan wilayah udara Indonesia adalah kerja sama Amerika Serikat dan Indonesia dalam meningkatkan pertahanan udara nasional. Kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan operasional TNI AU secara keseluruhan melalui akuisisi perangkat keras pertahanan mutakhir, pelatihan kooperatif, inisiatif pendidikan, dan dukungan logistik.

Dampak jangka panjang dari kolaborasi ini sangat besar bagi keamanan nasional Indonesia, terlepas dari kesulitan implementasi. Indonesia dapat mengembangkan postur militer yang lebih kuat yang dapat beradaptasi dengan potensi ancaman dengan menjaga hubungan baik dengan AS dan negara-negara mitra lainnya. (Beberapa tindakan yang diambil melalui kerja sama Indonesia-AS). Amerika Serikat telah menghibahkan pesawat tempur F-16 kepada Indonesia dalam beberapa tahun terakhir melalui program Foreign Military Sales (FMS). Komponen penting dari kerja sama ini adalah penyediaan program pendidikan bagi personel Angkatan Udara Indonesia di fasilitas pendidikan militer AS. Akuisisi perangkat keras pertahanan kontemporer adalah salah satu aspek utama dari kolaborasi ini.

Dari ketiga tinjauan diatas yang saya ambil menjelaskan kerja sama yang dilakukan Indonesia dengan negara luar. ketiga penelitian tersebut menunjukkan bahwa kerja sama pertahanan merupakan instrumen penting yang digunakan Indonesia untuk meningkatkan kapasitas pertahanan nasional, memperkuat kemampuan militer, serta mendukung kepentingan strategis negara. Penelitian-penelitian tersebut juga memperlihatkan bahwa keberhasilan suatu

kerja sama pertahanan tidak hanya ditentukan oleh kebutuhan pertahanan semata, tetapi juga dipengaruhi oleh pertimbangan politik, ekonomi, dan keamanan yang melatarbelakangi hubungan antarnegara.

Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang berfokus pada kerja sama pertahanan Indonesia dengan Prancis dan Amerika Serikat, penelitian ini memfokuskan kajian pada DCA antara Indonesia dan Australia yang ditandatangani pada tahun 2024. Selain itu, penelitian ini menggunakan perspektif Two-Level Games Robert Putnam untuk menjelaskan bagaimana interaksi antara faktor internasional dan faktor domestik memengaruhi proses negosiasi serta pembentukan kerja sama pertahanan tersebut.

1.6 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan Teori Two-Level Games. Robert Putnam mengusulkan teori Two-level games Menurut teori ini, aktor domestik harus menerima dan mendukung keputusan yang dibuat di tingkat internasional agar kebijakan luar negeri dan kepentingan domestik dapat berinteraksi. Interaksi tersebut terwujud di dalam proses pembuatan perjanjian internasional. Teori tersebut dijelaskan oleh Putnam di dalam tulisannya yang berjudul “Diplomacy and Domestic Politics : the Logic of Two-Level Games”. Teori Two level games, terdapat dua tingkatan utama di mana negosiasi internasional berlangsung: Level I (Tingkat Internasional) dan Level II (Tingkat Domestik). Untuk mencapai kesepakatan internasional, seperti kesepakatan kerja sama keamanan, ekonomi, atau lingkungan, pemerintah dua negara melakukan negosiasi di Tingkat I. Pada tahap ini, pemimpin negara atau diplomat berusaha mencapai kesepakatan yang

menguntungkan kepentingan negara mereka. Namun, karena kesepakatan tersebut masih perlu diratifikasi oleh pihak-pihak domestik di masing-masing negara, kesepakatan yang dibuat di tingkat internasional tidak selalu dapat segera diimplementasikan. (Putnam 1988). Selanjutnya, Level II merupakan proses domestik di mana kesepakatan internasional yang telah dinegosiasikan harus mendapatkan persetujuan dari berbagai aktor domestik, seperti parlemen, partai politik, kelompok kepentingan, birokrasi pemerintah, maupun opini publik. Pada tahap ini, pemerintah harus memastikan bahwa kesepakatan internasional tersebut dapat diterima oleh aktor domestik agar dapat diratifikasi dan diimplementasikan. (Putnam 1988). Menurut Putnam, terdapat tiga kelompok faktor utama yang memengaruhi besar atau kecilnya win-set suatu negara. Faktor-faktor tersebut meliputi preferensi dan koalisi domestik (Level II Preferences and Coalitions), institusi politik domestik (Level II Political Institutions), dan strategi negosiator (Strategies of Level I Negotiators) (Putnam 1988).

Faktor pertama adalah preferensi dan koalisi domestik (Level II Preferences and Coalitions). Faktor ini berkaitan dengan bagaimana aktor-aktor domestik memandang suatu kesepakatan internasional serta sejauh mana mereka memberikan dukungan terhadap kesepakatan tersebut. Menurut Putnam, ukuran win-set akan semakin besar apabila terdapat dukungan yang luas dari berbagai kelompok domestik terhadap hasil negosiasi yang dicapai pemerintah. Sebaliknya, apabila terdapat banyak kelompok yang menolak atau memiliki preferensi yang bertentangan, maka win-set akan menjadi lebih sempit. Dalam konteks penelitian ini, faktor tersebut dapat dilihat dari bagaimana pemerintah Indonesia, Kementerian Pertahanan, TNI, DPR, serta berbagai kelompok strategis

memandang Defence Cooperation Agreement dengan Australia. Demikian pula di Australia, dukungan pemerintah, Australian Defence Force (ADF), parlemen, dan pemangku kepentingan lainnya akan memengaruhi ruang gerak pemerintah dalam menerima atau menolak berbagai klausul kerja sama pertahanan yang dinegosiasikan (Putnam 1988).

Faktor kedua adalah institusi politik domestik (Level II Political Institutions). Faktor ini merujuk pada mekanisme politik dan kelembagaan yang mengatur proses penerimaan, ratifikasi, maupun implementasi suatu kesepakatan internasional. Menurut Putnam, setiap negara memiliki struktur institusi yang berbeda sehingga tingkat kesulitan dalam memperoleh persetujuan domestik juga berbeda. Negara yang memiliki proses ratifikasi yang kompleks cenderung memiliki win-set yang lebih kecil karena lebih banyak aktor yang harus menyetujui suatu kesepakatan. Sebaliknya, negara yang memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang lebih sederhana cenderung memiliki win-set yang lebih besar. Dalam penelitian ini, faktor institusi politik domestik dianalisis melalui mekanisme pengambilan keputusan di Indonesia dan Australia yang berkaitan dengan kerja sama pertahanan, termasuk peran lembaga eksekutif, legislatif, dan institusi pertahanan dalam mendukung atau membatasi ruang negosiasi pemerintah (Putnam 1988).

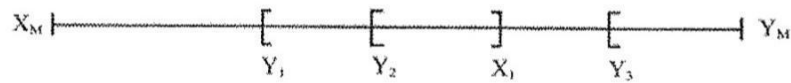
Faktor ketiga adalah strategi negosiator (Strategies of Level I Negotiators). Faktor ini menjelaskan bagaimana para negosiator memanfaatkan kondisi domestik untuk memperkuat posisi tawar mereka dalam negosiasi internasional. Menurut Putnam, keterbatasan domestik tidak selalu menjadi hambatan bagi negosiator. Dalam beberapa situasi, negosiator justru dapat menggunakan tekanan

domestik sebagai instrumen untuk memperoleh konsesi yang lebih menguntungkan dari pihak lawan. Dengan menunjukkan bahwa ruang kompromi yang dimiliki sangat terbatas akibat tekanan domestik, seorang negosiator dapat meningkatkan posisi tawarnya dalam proses negosiasi internasional. Dalam konteks DCA, pemerintah Indonesia dan Australia dapat memanfaatkan berbagai pertimbangan domestik untuk memperkuat posisi negosiasi masing-masing sehingga kesepakatan yang dicapai tetap sejalan dengan kepentingan nasional dan dapat diterima oleh aktor domestik kedua negara (Putnam 1988).

Dalam skala internasional, Indonesia dan Australia berdedikasi untuk meningkatkan interoperabilitas pasukan militer mereka, bertukar informasi intelijen, dan mengadakan latihan militer gabungan. Selain memperkuat kemampuan pertahanan, kolaborasi ini juga bertujuan untuk menciptakan stabilitas di kawasan yang semakin kompleks. Melalui DCA, kedua negara bertujuan untuk mengatasi masalah seperti keamanan maritim dan perubahan iklim sembari menunjukkan kolaborasi strategis yang menguntungkan kedua belah pihak.

Di tingkat domestik, kedua pemerintah harus menghadapi kesulitan untuk memenangkan hati rakyat dan membangun legitimasi politik. Dengan menguraikan keuntungan spesifik dari kemitraan dalam konteks pertahanan dan keamanan, Indonesia harus memastikan bahwa kolaborasi tersebut tidak akan membahayakan kedaulatan nasional. Sementara itu, pemerintah Australia harus meyakinkan masyarakat bahwa partisipasi dalam DCA akan meningkatkan posisi mereka di wilayah tersebut tanpa menyebabkan ketidakstabilan.

Gambar 1.1 Pemetaan Win-set Teori Two level games



Sumber : Robert Putnam (1988).

Dalam ilustrasi tersebut, X_M dan Y_M menunjukkan hasil maksimum yang dapat diterima oleh negara X dan negara Y. Sementara itu, X_1 dan Y_1 menunjukkan hasil minimum yang masih dapat diratifikasi atau diterima secara domestik oleh masing-masing negara. Pada kondisi awal, setiap kesepakatan yang berada di antara X_1 dan Y_1 masih dapat diterima oleh kedua pihak sehingga peluang tercapainya kesepakatan cukup besar. Namun, apabila win-set negara Y dipersempit menjadi Y_2 , misalnya karena adanya persyaratan ratifikasi yang lebih ketat atau meningkatnya tekanan politik domestik, maka hasil-hasil kesepakatan yang berada di antara Y_1 dan Y_2 tidak lagi dapat diterima.

Akibatnya, ruang kompromi dalam negosiasi menjadi semakin kecil dan posisi tawar negara Y menjadi lebih kuat karena pilihan kesepakatan yang tersedia semakin terbatas. Akan tetapi, apabila negara Y kembali memperkecil win-set-nya hingga mencapai Y_3 , misalnya dengan mensyaratkan persetujuan bulat dalam proses ratifikasi, maka negosiasi justru akan mengalami kebuntuan. Hal ini terjadi karena tidak ada lagi irisan antara win-set negara X dan negara Y, sehingga tidak terdapat hasil kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Bagian selanjutnya menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menentukan ukuran win-set. Putnam menyatakan bahwa penting untuk memahami kondisi apa saja yang memengaruhi besar atau kecilnya win-set suatu negara. Ada juga tiga

indikator utama. Pertama, kepentingan internasional Indonesia dan Australia pada Level I, yang mencakup kebutuhan kedua negara dalam menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik, memperkuat keamanan maritim, meningkatkan interoperabilitas militer, dan merespons dinamika keamanan regional. Kedua, faktor-faktor domestik pada Level II, yang meliputi preferensi aktor domestik dan institusi politik yang memengaruhi posisi negosiasi masing-masing negara. Ketiga, irisan win-set Indonesia dan Australia, yaitu ruang kompromi yang memungkinkan kedua negara mencapai kesepakatan yang dapat diterima baik oleh aktor internasional maupun aktor domestik.

Teori Two-Level Games yang dikemukakan oleh Robert Putnam dipilih karena mampu menjelaskan proses terbentuknya DCA Indonesia Australia tidak hanya dari aspek hubungan internasional, tetapi juga dari dinamika politik domestik yang memengaruhi pengambilan keputusan kedua negara. DCA merupakan hasil negosiasi yang melibatkan kepentingan strategis Indonesia dan Australia pada level internasional, seperti penguatan kerja sama pertahanan, keamanan maritim, interoperabilitas militer, dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Namun, kesepakatan tersebut juga harus memperoleh penerimaan dari berbagai aktor domestik di masing-masing negara, termasuk pemerintah, institusi pertahanan, parlemen, serta opini publik.

Oleh karena itu, teori Two-Level Games menjadi relevan karena mampu menjelaskan bagaimana pemerintah Indonesia dan Australia menyeimbangkan kepentingan internasional dengan tuntutan domestik selama proses perundingan DCA. Melalui konsep win-set, teori ini juga dapat digunakan untuk menganalisis ruang kompromi yang memungkinkan kedua negara mencapai kesepakatan yang

dapat diterima pada tingkat internasional maupun domestik. Dengan demikian, teori Two-Level Games memberikan kerangka analisis yang tepat untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai bagaimana kerja sama keamanan Indonesia dan Australia melalui Defence Cooperation Agreement dapat terbentuk dan disepakati pada periode 2021–2024.

1.7 Argumen Sementara

Berdasarkan teori dari two-level game dapat disimpulkan bahwa Indonesia dan Australia menandatangani perjanjian karena bertujuan untuk meningkatkan kerja sama militer dan keamanan dibawah DCA untuk mengatasi masalah regional seperti, ancaman siber, terorisme, dan juga dinamika kekuatan di wilayah Indo-Pasifik serta adanya tujuan keuntungan internasional dan juga domestik. Di tingkat internasional, Indonesia dan Australia bertujuan untuk meningkatkan interoperabilitas pasukan mereka, bertukar informasi intelijen, dan mengadakan pelatihan militer gabungan.

Kolaborasi ini juga bertujuan untuk menciptakan stabilitas di kawasan yang semakin kompleks melalui DCA. Di tingkat domestik, Indonesia dan Australia mengalami kesulitan untuk menenangkan hati rakyat dan membangun legitimasi politik. Di sisi lain, kedua negara keuntungan spesifik dari kemitraan dalam konteks pertahanan dan juga keamanan Indonesia juga harus memastikan bahwa kerja sama ini tidak akan membahayakan bagi kedaulatan nasional.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif dengan melalui pendekatan deskriptif. Metode tersebut dilakukan karena adanya studi kasus yang menggunakan satu teori dengan tujuan untuk menganalisa suatu kasus ataupun mencari solusi serta menjawab setiap pertanyaan yang ada. Penelitian ini akan menghasilkan tulisan berupa data-data valid yang dikumpulkan kedalam satu kerangka tulisan. Penulis juga menggunakan jenis penelitian ini untuk mengetahui bagaimana selanjutnya kerja sama Indonesia dan Australia dalam memperketat keamanan melalui Defence Cooperation Agreement pada tahun 2021

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini merupakan kerja sama keamanan Indonesia dan Australia dalam memperkuat sistem keamanan kedua negara melalui Defence Cooperation Agreement pada rentang tahun 2021 hingga 2024. Sedangkan subjek pada penelitian ini ialah Indonesia dan Australia, hal ini dikarenakan mengambil isu - isu atau kasus yang terjadi di Indonesia.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data secara tidak langsung. Pengumpulan data ini dilakukan melalui penelaahan terhadap buku-buku, artikel, laporan, dokumen dan bahan-bahan sejenis yang ada. Kuliah dan bahan tertulis, yang kemudian menjadi dasar penelitian di mana informasi dan pengetahuan dicari dan dikumpulkan, berdasarkan sifat literatur baik teoritis maupun empiris dan referensi yang terkait dengan subjek atau mata

pelajaran yang dibahas. Penulis juga mengumpulkan informasi melalui website online untuk mencari informasi yang dapat dijadikan acuan dalam penulisan penelitian ini.

1.8.4 Proses Penelitian

Proses penelitian ini dilakukan dengan cara mencari data - data melalui jurnal, artikel, berita ataupun media, dan juga mendatangi beberapa perpustakaan untuk mendapatkan data dari buku - buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.9 Sistematika Pembahasan

Bab I : Bab ini menjelaskan tentang hal-hal yang membahas mengenai latar belakang penelitian, Rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, kajian pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Dalam bab ini berisi tentang penjelasan kerja sama keamanan antara Indonesia dan Australia dalam Defence Cooperation Agreement .

Bab III : Bab ini menjelaskan jawaban dari rumusan masalah dengan menggunakan teori two-level games serta indikator penelitian lainnya.

Bab IV : Bab ini berisikan pernyataan akhir dari seluruh proses penelitian, serta membuat kesimpulan penelitian yang akan dilakukan berdasarkan data-data yang ada kemudian akan memberikan saran-saran bagi peneliti lain yang berminat melanjutkan atau mengoreksi hasil penelitian ini.

BAB 2

KERJA SAMA KEAMANAN INDONESIA - AUSTRALIA

2.1 Perjanjian Keamanan Indonesia dan Australia

Meskipun proses penyusunannya dimulai pada 1994 sehingga kadang dirujuk sebagai *Security Agreement* 1994. Perjanjian ini merupakan tonggak penting dalam hubungan pertahanan kedua negara pada tanggal 18 Desember 1995, Australia dan Indonesia menandatangani security agreement yang oleh beberapa pengamat disebut sebagai perjanjian bersejarah, yang pertama antara kedua negara yang pernah menjadi lawan, dan yang pertama kali ditandatangani oleh Indonesia dengan negara lain. Secara resmi dikenal sebagai Perjanjian Australia-Indonesia tentang Pemeliharaan Keamanan, perjanjian ini menetapkan, sebagaimana dikatakan oleh mantan Perdana Menteri Australia Paul Keating, kepentingan bersama yang dimiliki Australia dan Indonesia dalam “ketentraman dan keamanan” wilayah sekitarnya, serta menegaskan niat kedua negara “untuk bekerja sama dalam mendukung kepentingan tersebut” (Keating 1995,).

Security Agreement terdiri dari tiga bagian utama. Perjanjian ini mengikat pemerintah Australia dan Indonesia untuk:

1. Melakukan konsultasi secara berkala di tingkat menteri mengenai isu-isu yang berdampak pada keamanan bersama mereka, dan menciptakan kerja sama yang dapat meningkatkan keamanan mereka sendiri dan kawasan.
2. berkonsultasi satu sama lain dalam hal tantangan yang merugikan salah satu pihak atau kepentingan keamanan bersama mereka, dan, jika dianggap perlu, mempertimbangkan langkah-langkah yang dapat diambil

secara individu atau kolektif sesuai dengan proses masing-masing pemerintah; dan

3. mendorong upaya kerja sama keamanan sesuai dengan kebijakan dan prioritas masing-masing (Keating 1995,).

Analisis terhadap redaksi Perjanjian, serta komentar-komentar “penafsiran” yang disampaikan oleh Keating dan pejabat-pejabat Indonesia tingkat tinggi, menunjukkan bahwa Perjanjian ini jauh lebih dari sekadar perjanjian pertahanan, seperti yang diklaim oleh beberapa pihak. Ini bukan sekadar perbedaan semantik.

Kedua negara telah sepakat pada definisi komprehensif tentang keamanan, di mana pertahanan terhadap serangan militer asing hanyalah salah satu dari beberapa potensi masalah keamanan yang akan dibahas dan disepakati oleh Australia dan Indonesia untuk mengambil tindakan yang sesuai. Perjanjian Keamanan Australia-Indonesia dapat dilihat sebagai kerangka kerja untuk membahas dan mengelola banyak isu keamanan non-militer yang muncul dan kemungkinan akan menjadi lebih penting dalam lingkungan keamanan abad ke-21, seperti migrasi ilegal, terorisme, lingkungan, dan kejahatan lintas batas (Alan 1996,).

Perjanjian ini sejalan dengan upaya terbaru di Asia Tenggara untuk mengalihkan “strategi dan perencanaan pertahanan dari landasan ancaman menjadi perhitungan berdasarkan kepentingan,” sebuah formula yang kini tampaknya dianggap sebagai salah satu prinsip yang mendasari pendekatan regional baru dalam bidang keamanan. Ada beberapa implikasi strategis yang

signifikan bagi Indonesia ketika Australia dan Indonesia menandatangani Perjanjian Keamanan 1994.

Pertama, karena Australia secara resmi mengakui peran Indonesia sebagai pemain kunci dalam stabilitas kawasan Asia-Pasifik untuk pertama kalinya, perjanjian ini meningkatkan kepercayaan politik dan strategis antara kedua negara.

Akibatnya, Indonesia memperoleh keuntungan diplomatik, memperkuat posisinya dalam geopolitik regional, dan meningkatkan reputasinya sebagai negara yang mampu menandatangani perjanjian keamanan dengan negara-negara yang lebih kaya (Sukma 1999,). Kedua, militer Indonesia menjadi lebih profesional pada tahun 1990-an sebagai hasil dari kerja sama pertahanan yang lebih intensif, yang mencakup pembicaraan tingkat tinggi, latihan militer bersama, dan pertukaran intelijen strategis. Ketiga, perjanjian ini menetapkan landasan bagi stabilitas dan kepercayaan keamanan bilateral dengan memberikan jaminan mengenai prosedur konsultasi jika salah satu pihak terancam di luar wilayahnya (Alan 1996,).

Namun, setelah Australia memimpin INTERFET selama krisis Timor Timur pada tahun 1999, dampak negatif mulai muncul. Indonesia merasa bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan semangat perjanjian, sehingga Indonesia membatalkan perjanjian tersebut, dan hubungan antara kedua negara mengalami periode ketegangan diplomatik yang singkat (Connery 2008,). Meskipun perjanjian tersebut berakhir pada 1999, pengalaman kerja sama dan dinamika yang muncul selama implementasinya menjadi pelajaran penting bagi kedua

negara dalam membangun kerangka kerja sama keamanan pada periode-periode berikutnya.

2.2 Lombok Treaty 2006

Australia dan Indonesia memiliki perjanjian yang dikenal sebagai Lombok Treaty. Pada tanggal 13 November 2006 pemerintah Indonesia dan Australia menandatangani sebuah perjanjian kerangka kerja sama keamanan yang dikenal dengan sebutan Traktat Lombok. Perjanjian Lombok tahun 2006 antara Indonesia dan Australia merupakan respons terhadap perubahan dinamika geopolitik dan keamanan di Asia Tenggara pada awal abad ke-21. Hubungan bilateral antara kedua negara, yang sebelumnya tegang akibat konfrontasi historis seperti pendudukan Indonesia atas Timor Timur pada tahun 1999, dan mulai membaik setelah reformasi demokratis Indonesia pada tahun 1998.

Serangan bom Bali tahun 2002, yang menewaskan 202 orang, termasuk 88 warga Australia, menjadi pemicu utama perjanjian ini, menyoroti kebutuhan kritis akan kerja sama intelijen dan kontra-terorisme serta ancaman terorisme yang sama-sama dihadapi (70 years indonesia australia, n.d.). Insiden ini berkontribusi pada pembentukan kepercayaan dan menunjukkan kemungkinan kerja sama kemanusiaan yang lebih luas, begitu pula dengan tragedi tsunami Aceh tahun 2004 yang memicu upaya bantuan internasional dari Australia seperti rekonstruksi di Aceh (Kedutaan Besar Australia Indonesia 2009).

Dari sudut pandang Indonesia, perjanjian tersebut didorong oleh keinginan untuk memperkuat posisi diplomatiknya di ASEAN, meningkatkan perdagangan dan investasi untuk pemulihan ekonomi pasca krisis 1997–1998, serta meningkatkan kemampuan keamanan nasional melalui dukungan teknologi dan

pelatihan militer dari Australia. Sesuai dengan kebijakan luar negerinya yang lebih berfokus pada Asia, Australia memandang perjanjian ini sebagai sarana untuk memastikan kepentingan strategisnya dengan membentuk aliansi dengan negara-negara tetangga terdekatnya, mengurangi risiko ancaman dari “arc of instability” di utara, seperti perdagangan narkoba dan migrasi ilegal, serta meningkatkan akses ekonomi ke pasar Indonesia yang besar (Hugh 2007,).

Perjanjian ini menyediakan kerangka kerja untuk menangani isu-isu keamanan konvensional dan non-konvensional. Perjanjian ini menyediakan kerangka hukum yang kokoh untuk mempromosikan komunikasi, kerja sama, dan pertukaran bilateral. Dalam bidang pertahanan, penegakan hukum, kontra-terorisme, keamanan maritim, dan manajemen serta tanggap bencana, perjanjian ini memperkuat tekad untuk berkolaborasi (“Lombok Treaty, 2006 — 70 years Indonesia-Australia” 2019) .

Bagi pemerintah Indonesia Traktat Lombok bukan hanya sebagai peningkatan kerja sama keamanan bilateral dengan Australia tetapi juga diterjemahkan sebagai upaya untuk menjaga dinamika hubungan agar menjadi lebih stabil. Bukan hanya itu, traktat ini dihasilkan sebagai perwujudan dampak dari intervensi terhadap Timor Timur dan ketegangan mengenai pencari suaka pada 2006 (Taylor).

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kemudian meretifikasi kerja sama tersebut pada tahun 2007. Namun, masih terdapat perselisihan terkait keamanan antara Australia dan Indonesia. Pada tahun 2009, layanan intelijen Australia menyadap percakapan presiden Indonesia (Kick News 2021). Selain itu, terdapat kasus lain di mana pemerintahan Tony Abbott menggunakan wilayah

kedaulatan Indonesia untuk menindak imigran ilegal yang berusaha masuk ke Australia. Pada 15 Januari 2014, sebuah perahu berwarna oranye yang membawa enam puluh imigran sandar di Jawa Barat pada 5 Februari, perahu kedua yang membawa tiga puluh empat orang melakukan hal yang sama (Paul 2014). Namun, dengan terlibat dalam pertukaran kadet atau siswa militer, kedua negara tampaknya berusaha memperkuat hubungan dan kembali pada prinsip-prinsip Perjanjian Lombok 2006 (Kick News 2021).

Perjanjian Lombok, yang merupakan perjanjian keamanan antara Indonesia dan Australia, memiliki beberapa prinsip dasar. Pertama, kedaulatan, kesatuan, kemerdekaan, dan integritas teritorial masing-masing negara. Kedua, mengakui nilai persahabatan antar negara dan menahan diri dari campur tangan dalam urusan dalam negeri satu sama lain. Ketiga, mengakui isu-isu global termasuk terorisme internasional dan risiko keamanan non-militer dan militer.

Kerja sama di bidang pertahanan, penegakan hukum, intelijen, kontra-terorisme, keamanan maritim, keamanan pembangunan, dan keamanan dalam pencegahan senjata pemusnah massal (WMD) diatur dalam Perjanjian Lombok. Selain itu, perjanjian ini juga mencakup kerja sama masyarakat, kerja sama darurat, dan kerja sama dengan organisasi internasional dalam hal-hal yang berkaitan dengan keamanan. Perjanjian Lombok akan memperkuat landasan kerja sama keamanan antara kedua negara, kata Menteri Luar Negeri Australia Stephen Smith kepada media. Dalam hal kerja sama kontra-terorisme, ia menyatakan bahwa ia dan Menteri Luar Negeri Wirajuda telah memutuskan untuk memperpanjang dan memperbarui memorandum of understanding (MoU) kedua

negara dalam memerangi terorisme internasional terorisme (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia 2008).

Perjanjian Lombok 2006 tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pemulihan hubungan Indonesia dan Australia pasca krisis Timor Timur, tetapi juga menjadi fondasi institusional yang memungkinkan kedua negara mengembangkan kerja sama keamanan secara lebih luas pada periode berikutnya. Melalui prinsip penghormatan terhadap kedaulatan, integritas wilayah, non-intervensi, dan konsultasi keamanan, perjanjian ini berhasil membangun kembali kepercayaan strategis yang sebelumnya mengalami penurunan. Kepercayaan tersebut kemudian menjadi modal penting bagi perluasan kerja sama pertahanan, keamanan maritim, kontra-terorisme, dan pertukaran informasi strategis yang berkembang sepanjang dekade berikutnya. Dalam konteks penelitian ini, Lombok Treaty dapat dipahami sebagai landasan yang membuka ruang bagi munculnya inisiatif pembentukan DCA pada tahun 2021–2024 sebagai bentuk penguatan kerja sama pertahanan Indonesia dan Australia yang lebih komprehensif.

2.3 Dinamika Kerja Sama Keamanan Indonesia–Australia Tahun 2021–2024

Tahun 2021–2024 merupakan fase penting dalam perkembangan hubungan keamanan Indonesia dan Australia. Pada periode ini kedua negara menghadapi lingkungan strategis kawasan Indo-Pasifik yang semakin dinamis akibat meningkatnya persaingan kekuatan besar, ketidakpastian keamanan regional, ancaman keamanan maritim, perkembangan ancaman siber, serta tantangan keamanan non-tradisional lainnya. Kondisi tersebut mendorong

Indonesia dan Australia untuk memperkuat koordinasi dan kerja sama keamanan guna menjaga stabilitas kawasan serta melindungi kepentingan nasional masing-masing. Dalam konteks tersebut, hubungan keamanan kedua negara mengalami peningkatan yang signifikan dan menjadi landasan bagi terbentuknya kerangka kerja sama pertahanan yang lebih komprehensif melalui DCA (Anwar 2021). Kedua negara menandatangani DCA pada tanggal 29 Agustus 2024, dengan tujuan untuk meningkatkan interoperabilitas (pembagian data/informasi) dan memperkuat kerja sama praktis antara angkatan bersenjata di berbagai bidang. Keamanan maritim, kontra-terorisme, bantuan kemanusiaan, manajemen krisis, dukungan logistik, pendidikan dan pelatihan, serta sektor pertahanan merupakan bidang-bidang di mana kerja sama telah dibentuk. Melalui komunikasi terbuka dan kerja sama yang tulus, kedua negara juga ingin membangun kepercayaan (Edna Caroline 2024).

Baik Australia maupun Indonesia berkomitmen untuk menciptakan kawasan yang produktif, aman, stabil, dan damai di mana kedaulatan dihormati. Dengan ASEAN sebagai inti utamanya, yang berperan sebagai kekuatan stabilisasi yang signifikan, kita memiliki visi cerah dan masa depan yang optimis untuk kawasan kita. Wakil Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Australia, dan, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, mengumumkan berakhirnya pembicaraan untuk menaikkan Perjanjian Kerja Sama Pertahanan Australia-Indonesia ke tingkat perjanjian selama pertemuan mereka di Canberra pada 20 Agustus 2024 (Kemhan 2024). Peningkatan kerja sama keamanan Indonesia dan Australia selama periode penelitian juga didorong oleh kepentingan strategis masing-masing negara. Bagi Indonesia, kerja sama dengan Australia

memberikan peluang untuk memperkuat kapasitas pertahanan nasional, meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertahanan, memperluas kerja sama pendidikan militer, serta mendukung modernisasi sektor pertahanan. Selain itu, kerja sama tersebut juga sejalan dengan kepentingan Indonesia dalam menjaga keamanan maritim dan stabilitas kawasan tanpa mengabaikan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia (Laksmana 2023).

Di sisi lain, Australia memandang Indonesia sebagai mitra strategis yang memiliki posisi penting dalam arsitektur keamanan kawasan Indo-Pasifik. Sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan memiliki posisi geografis yang strategis, Indonesia dipandang sebagai aktor penting dalam mendukung stabilitas regional. Oleh karena itu, Australia berkepentingan untuk memperkuat hubungan keamanan dengan Indonesia guna meningkatkan koordinasi dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan kawasan yang semakin kompleks, baik yang bersifat tradisional maupun non-tradisional (DFAT 2024).

Para Menteri meninjau kembali pertemuan terakhir mereka dan membahas perkembangan hubungan pertahanan bilateral di berbagai sektor dan dimensi, seperti kerja sama yang lebih erat dalam keamanan maritim dan hubungan pendidikan yang lebih mendalam. Prinsip non-blok Indonesia juga diakui dan dihormati oleh Australia. Sebagai hasilnya, perjanjian ini bukanlah aliansi militer, melainkan komitmen untuk memperkuat kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Australia. Hal ini meningkatkan interoperabilitas antara angkatan bersenjata kedua negara, di antara hal-hal lain. Latihan militer bersama adalah salah satu contohnya (Mohamad Final Daeng 2024). Menurut Marles, latihan gabungan

terbesar antara Indonesia dan Australia akan dilaksanakan di Surabaya, Jawa Timur, pada bulan November tahun ini. Sekitar 2.000 prajurit dari angkatan udara, laut, dan darat kedua negara akan ikut serta dalam latihan tersebut.

Menurut pernyataan pers dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, DCA Indonesia-Australia yang mengikat secara hukum ini menunjukkan niat tulus kedua negara untuk memperkuat dan mempererat hubungan pertahanan dalam kerangka aliansi strategis yang komprehensif (Mohamad Final Daeng 2024). Perkembangan hubungan keamanan yang semakin intensif kemudian mendorong kedua negara untuk membangun kerangka kerja sama yang lebih komprehensif.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menyebutkan bahwa proses penyusunan DCA melibatkan lebih dari tiga puluh pertemuan koordinasi antara berbagai kementerian, lembaga pertahanan, dan pemangku kepentingan dari kedua negara. Proses tersebut menunjukkan bahwa pembentukan DCA bukan merupakan hasil dari keputusan yang bersifat spontan, melainkan hasil dari serangkaian proses diplomasi, konsultasi, dan negosiasi yang berlangsung secara bertahap untuk menyelaraskan kepentingan strategis masing-masing negara. Intensitas negosiasi tersebut menunjukkan adanya upaya kedua pihak untuk menemukan titik temu yang dapat diterima oleh kepentingan domestik maupun kepentingan bilateral masing-masing negara (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia 2024). Selama periode 2021–2024, hubungan pertahanan Indonesia dan Australia menunjukkan perkembangan yang semakin intensif. Kedua negara secara rutin melaksanakan dialog strategis tingkat tinggi, pertukaran personel

militer, pendidikan dan pelatihan pertahanan, serta berbagai latihan militer gabungan. Peningkatan frekuensi kerja sama tersebut menunjukkan adanya tingkat kepercayaan strategis yang semakin kuat antara kedua negara. Dalam perspektif hubungan internasional, kondisi tersebut menjadi faktor penting yang memungkinkan kedua negara membangun kesepahaman mengenai perlunya peningkatan kerja sama pertahanan melalui DCA (Department of Foreign Affairs and Trade Australia 2024).

Latihan militer bersama yang dilaksanakan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Australian Defence Force (ADF) tidak hanya bertujuan meningkatkan kemampuan operasional, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pembangunan kepercayaan strategis (*confidence building measures*). Pembangunan kepercayaan merupakan salah satu prasyarat penting dalam pengembangan kerja sama keamanan bilateral yang berkelanjutan. Oleh karena itu, meningkatnya frekuensi latihan bersama selama periode 2021–2024 menunjukkan semakin tingginya tingkat kepercayaan antara Indonesia dan Australia yang pada akhirnya mendukung proses pembentukan kerangka kerja sama pertahanan yang lebih komprehensif (Connery 2008).

Dengan demikian, dinamika kerja sama keamanan Indonesia dan Australia selama periode 2021–2024 menunjukkan adanya peningkatan interaksi, kepercayaan strategis, dan kesamaan kepentingan dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan kawasan. Berbagai bentuk kerja sama yang berkembang selama periode tersebut menciptakan kondisi yang memungkinkan kedua negara membangun kesepahaman mengenai kebutuhan akan kerangka kerja sama

keamanan yang lebih komprehensif. Kondisi inilah yang kemudian menjadi landasan bagi tercapainya Defence Cooperation Agreement (DCA) sebagai bentuk penguatan hubungan keamanan Indonesia dan Australia pada tahun 2025.

2.4 DCA sebagai Kerangka Kerja Sama Keamanan Indonesia Australia 2025

Defence Cooperation Agreement (DCA) antara Indonesia dan Australia merupakan tonggak penting dalam perkembangan hubungan keamanan kedua negara. Perjanjian ini menjadi bentuk penguatan dan institusionalisasi kerja sama pertahanan yang dibangun di atas fondasi hubungan bilateral yang telah berkembang sejak ditandatanganinya *Agreement on Maintaining Security* tahun 1995, *Lombok Treaty* tahun 2006, serta *Comprehensive Strategic Partnership* tahun 2018. Kehadiran DCA menunjukkan adanya komitmen kedua negara untuk memperkuat kerja sama keamanan melalui suatu kerangka yang lebih komprehensif, terstruktur, dan mampu menjawab tantangan lingkungan strategis yang terus berkembang di kawasan Indo-Pasifik (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia 2024). DCA dapat dipahami sebagai bentuk institusionalisasi kerja sama keamanan antara Indonesia dan Australia. Institusionalisasi tersebut penting karena memungkinkan kedua negara memiliki pedoman yang lebih jelas dalam melaksanakan berbagai bentuk kerja sama pertahanan secara berkelanjutan. Sekaligus memberikan kepastian mengenai ruang lingkup kerja sama yang dapat dikembangkan pada masa mendatang (Australian Department of Defence 2024).

Salah satu tujuan utama DCA adalah meningkatkan interoperabilitas antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Australian Defence Force (ADF).

Interoperabilitas merujuk pada kemampuan dua institusi militer untuk bekerja sama secara efektif melalui kesamaan prosedur operasional, komunikasi, koordinasi, dan pelaksanaan kegiatan militer bersama. Dalam lingkungan keamanan yang semakin dinamis, kemampuan interoperabilitas menjadi faktor penting untuk meningkatkan efektivitas kerja sama pertahanan, terutama dalam pelaksanaan latihan bersama, operasi bantuan kemanusiaan, serta berbagai bentuk kerja sama keamanan lainnya. Oleh karena itu, DCA memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi peningkatan interoperabilitas antara kedua angkatan bersenjata (Australian Department of Defence, 2024).

Selain meningkatkan interoperabilitas militer, DCA juga memberikan perhatian yang besar terhadap kerja sama keamanan maritim. Indonesia dan Australia merupakan negara yang memiliki posisi strategis di kawasan Indo-Pasifik dan sama-sama berkepentingan menjaga keamanan jalur pelayaran internasional yang menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Berbagai tantangan seperti penyelundupan manusia, perdagangan ilegal lintas batas, perompakan, penangkapan ikan ilegal, serta meningkatnya kompetisi geopolitik kawasan menjadikan keamanan maritim sebagai salah satu prioritas utama dalam hubungan kedua negara. Melalui DCA, Indonesia dan Australia berupaya memperkuat pertukaran informasi, koordinasi operasional, dan pengembangan kapasitas guna menjaga stabilitas kawasan maritim yang menjadi kepentingan bersama (Department of Foreign Affairs and Trade Australia, 2024; Australian Strategic Policy Institute, 2024).

Ruang lingkup kerja sama dalam DCA juga mencakup bidang pendidikan dan pelatihan pertahanan. Kerja sama ini meliputi pertukaran personel militer, program pendidikan perwira, pelatihan teknis, serta pengembangan sumber daya manusia di sektor pertahanan. Pendidikan dan pelatihan pertahanan memiliki peran penting dalam membangun profesionalisme personel militer sekaligus memperkuat hubungan kelembagaan antara TNI dan ADF. Melalui peningkatan kerja sama pendidikan dan pelatihan, kedua negara dapat meningkatkan kemampuan personel pertahanan dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan yang semakin kompleks dan multidimensional (Australian Department of Defence 2024).

Selain aspek operasional, DCA juga membuka peluang bagi pengembangan kerja sama industri pertahanan dan teknologi pertahanan. Perkembangan teknologi militer yang semakin pesat menuntut negara-negara untuk meningkatkan kapasitas inovasi dan modernisasi sektor pertahanan. Dalam konteks tersebut, Indonesia dan Australia memiliki peluang untuk memperluas kerja sama dalam bidang penelitian, pengembangan teknologi, pertukaran pengetahuan, serta penguatan kapasitas industri pertahanan nasional. Kerja sama tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat strategis bagi kedua negara melalui peningkatan kemampuan teknologi dan penguatan kemandirian pertahanan nasional masing-masing pihak (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia 2024).

Bagi Indonesia, DCA memiliki arti strategis karena dapat mendukung upaya modernisasi pertahanan nasional, memperkuat kapasitas sumber daya

manusia pertahanan, serta meningkatkan kemampuan menjaga keamanan maritim nasional. Meskipun demikian, kerja sama tersebut tetap dilaksanakan dalam kerangka politik luar negeri bebas aktif yang menjadi prinsip dasar kebijakan luar negeri Indonesia. Oleh karena itu, keterlibatan Indonesia dalam DCA tidak dimaksudkan untuk membentuk aliansi militer ataupun mengikat Indonesia ke dalam blok keamanan tertentu, melainkan sebagai instrumen untuk memperkuat kapasitas pertahanan nasional dan mendukung stabilitas kawasan (Anwar 2021).

Di sisi lain, Australia memandang Indonesia sebagai mitra strategis yang memiliki posisi penting dalam menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dengan posisi geografis yang strategis, Indonesia dipandang memiliki peran penting dalam mendukung keamanan regional. Oleh karena itu, Australia memiliki kepentingan untuk memperkuat hubungan keamanan dengan Indonesia guna meningkatkan koordinasi dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan kawasan, baik yang bersifat tradisional maupun non-tradisional. Penguatan hubungan pertahanan dengan Indonesia juga sejalan dengan kepentingan Australia dalam menciptakan kawasan Indo-Pasifik yang stabil, aman, dan terbuka (Department of Foreign Affairs and Trade Australia 2024).

Defence Cooperation Agreement (DCA) tahun 2025 dapat dipahami sebagai bentuk penguatan institusional hubungan keamanan Indonesia dan Australia yang dibangun melalui proses interaksi dan kerja sama yang berkembang selama beberapa dekade. Perjanjian ini tidak hanya mencerminkan meningkatnya tingkat kepercayaan strategis antara kedua negara, tetapi juga

menunjukkan adanya kesamaan kepentingan dalam menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Melalui DCA, Indonesia dan Australia berhasil membangun kerangka kerja sama keamanan yang lebih komprehensif, terstruktur, dan berkelanjutan untuk menghadapi berbagai tantangan keamanan regional di masa mendatang. Dalam konteks penelitian ini, DCA menjadi hasil dari proses penyelarasan kepentingan yang dilakukan oleh Indonesia dan Australia sehingga memungkinkan kedua negara mencapai kesepakatan kerja sama keamanan yang dapat diterima oleh masing-masing pihak.

BAB 3

ANALISIS KERJA SAMA KEAMANAN INDONESIA AUSTRALIA DALAM DEFENCE COOPERATION AGREEMENT MELALUI TWO LEVEL GAMES

3.1 Level Internasional dan Domestik Indonesia Dalam DCA

Dalam perspektif Two-Level Games yang dikemukakan oleh Robert Putnam, Level I merupakan arena internasional tempat pemerintah suatu negara melakukan negosiasi dengan negara lain untuk mencapai kesepakatan yang dapat mengakomodasi kepentingan nasional masing-masing pihak (Putnam 1988). Dalam konteks Defence Cooperation Agreement (DCA) antara Indonesia dan Australia, Pemerintah Indonesia memasuki proses negosiasi dengan sejumlah kepentingan strategis yang berkaitan dengan penguatan kapasitas pertahanan nasional, peningkatan kerja sama keamanan maritim, modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista), serta penguatan posisi Indonesia dalam menghadapi dinamika keamanan kawasan Indo-Pasifik yang semakin kompleks. Oleh karena itu, keterlibatan Indonesia dalam perundingan DCA tidak dapat dipahami semata-mata sebagai upaya mempererat hubungan bilateral dengan Australia, tetapi juga sebagai strategi untuk mendukung kepentingan keamanan nasional Indonesia dalam lingkungan strategis yang terus berubah.

Perubahan lingkungan keamanan kawasan Indo-Pasifik menjadi salah satu faktor utama yang mendorong Indonesia untuk memperkuat kerja sama pertahanan dengan berbagai negara mitra, termasuk Australia. Meningkatnya

persaingan kekuatan besar di kawasan, perkembangan ancaman keamanan non-tradisional, serta meningkatnya kompleksitas tantangan keamanan maritim telah mendorong Indonesia untuk mengembangkan kerja sama yang dapat meningkatkan kapasitas pertahanan nasional tanpa mengurangi independensi kebijakan luar negeri yang dianutnya. Dalam konteks tersebut, Australia dipandang sebagai mitra strategis yang memiliki kepentingan yang relatif sejalan dengan Indonesia dalam menjaga stabilitas kawasan dan keamanan jalur pelayaran internasional yang menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik (Anwar 2021)

Salah satu kepentingan utama Indonesia dalam negosiasi DCA adalah memperkuat kapasitas pertahanan nasional melalui peningkatan kerja sama militer dan pertahanan. Selama beberapa tahun terakhir, Indonesia terus berupaya melakukan modernisasi sektor pertahanan guna meningkatkan kemampuan menghadapi berbagai bentuk ancaman keamanan yang berkembang. Selain modernisasi pertahanan, Indonesia juga memiliki kepentingan untuk memperkuat keamanan maritim. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki wilayah laut yang sangat luas, keamanan maritim merupakan salah satu prioritas utama dalam kebijakan keamanan nasional Indonesia. Berbagai tantangan seperti penangkapan ikan ilegal, penyelundupan manusia, perdagangan ilegal lintas batas, dan meningkatnya aktivitas geopolitik di kawasan maritim Indo-Pasifik menuntut Indonesia untuk meningkatkan kerja sama dengan negara-negara yang memiliki kepentingan serupa. Dalam konteks tersebut, Australia menjadi mitra yang relevan.

Selain itu, DCA merupakan sarana untuk pengembangan kapasitas pertahanan dalam level internasional. Melalui kerja sama ini, Indonesia memperoleh akses ke teknologi pertahanan yang lebih mutakhir, peningkatan kemampuan militer, serta transfer pengetahuan. Profesionalisme dan interoperabilitas Tentara Nasional Indonesia (TNI) meningkat secara signifikan berkat latihan militer bersama, pertukaran personel militer, dan kerja sama di bidang pendidikan pertahanan. Dari sudut pandang internasional, pengembangan kapasitas ini memperkuat peran Indonesia dalam menjaga stabilitas regional sekaligus meningkatkan kemampuan militer nasional (Haura, 2025).

Pada level internasional, dinamika negosiasi DCA juga dipengaruhi oleh situasi geopolitik Indo-Pasifik, khususnya setelah pembentukan AUKUS pada tahun 2021. AUKUS merupakan kerja sama keamanan trilateral antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat yang salah satu fokus utamanya adalah pengembangan kapal selam bertenaga nuklir bagi Australia. Kehadiran AUKUS meningkatkan perhatian negara-negara di kawasan terhadap potensi perlombaan senjata dan meningkatnya rivalitas geopolitik antara blok Barat dan China. Dalam konteks ini, Australia berusaha meyakinkan Indonesia bahwa DCA berbeda dengan AUKUS dan bertujuan untuk memperkuat stabilitas kawasan serta kerja sama bilateral, bukan membangun aliansi militer baru (Farhan 2024).

Meskipun memiliki kepentingan untuk memperkuat kerja sama pertahanan dengan Australia, Indonesia tetap berupaya menjaga konsistensi politik luar negeri bebas aktif yang menjadi landasan utama kebijakan luar negeri Indonesia sejak masa awal kemerdekaan. Prinsip bebas aktif mengharuskan Indonesia untuk tidak terikat pada blok kekuatan tertentu serta tetap memiliki kebebasan dalam

menentukan sikap terhadap berbagai isu internasional. Oleh karena itu, selama proses negosiasi DCA, Indonesia berusaha memastikan bahwa kerja sama yang dibangun tidak mengandung unsur aliansi militer maupun kewajiban pertahanan kolektif yang dapat membatasi ruang gerak kebijakan luar negeri Indonesia. Posisi ini menjadi salah satu pertimbangan penting dalam proses perundingan dan memengaruhi bentuk akhir kesepakatan yang dicapai antara kedua negara (Anwar 2021).

Keberhasilan suatu kesepakatan internasional tidak hanya ditentukan oleh proses negosiasi di tingkat internasional, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah memperoleh dukungan dari aktor-aktor domestik yang memiliki kepentingan terhadap hasil negosiasi tersebut. Dalam konteks Defence Cooperation Agreement (DCA) antara Indonesia dan Australia, proses penerimaan domestik menjadi faktor yang sangat penting karena pemerintah Indonesia harus memastikan bahwa kerja sama pertahanan yang disepakati tidak menimbulkan resistensi politik maupun bertentangan dengan kepentingan nasional yang lebih luas.

Salah satu aktor domestik yang memiliki peran sentral dalam pembentukan DCA adalah Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap perumusan dan pelaksanaan kebijakan pertahanan nasional, Kementerian Pertahanan memiliki kepentingan untuk memperkuat kapasitas pertahanan Indonesia melalui berbagai bentuk kerja sama internasional. Dalam perspektif Kementerian Pertahanan, DCA memberikan peluang untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pertahanan, memperluas kerja sama pendidikan militer, memperkuat latihan bersama, serta meningkatkan kapasitas institusi pertahanan Indonesia dalam menghadapi

tantangan keamanan yang semakin kompleks (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia 2024).

Selain Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga menjadi aktor domestik yang memiliki kepentingan langsung terhadap implementasi DCA. Bagi TNI, kerja sama pertahanan dengan Australia memberikan manfaat dalam bentuk peningkatan interoperabilitas, transfer pengetahuan, pengembangan kapasitas personel, serta peningkatan kemampuan operasional melalui berbagai program latihan bersama dan pertukaran militer. Kerja sama tersebut dipandang dapat mendukung proses transformasi dan modernisasi TNI yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, keberadaan DCA cenderung memperoleh dukungan dari institusi militer karena dianggap mampu memberikan manfaat yang konkret terhadap peningkatan profesionalisme dan kesiapan pertahanan nasional (Laksmiana 2023).

Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa kerja sama yang dibangun dengan Australia tetap sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Dalam proses pembentukan DCA, Kementerian Luar Negeri berperan memastikan bahwa kesepakatan yang dihasilkan tidak mengarah pada pembentukan aliansi militer maupun keterikatan terhadap kepentingan strategis negara tertentu. Peran ini penting karena Indonesia secara konsisten berupaya mempertahankan posisi independennya dalam politik internasional serta menghindari keterlibatan dalam rivalitas kekuatan besar yang berkembang di kawasan Indo-Pasifik. Dengan demikian, dukungan Kementerian Luar Negeri terhadap DCA sangat bergantung

pada sejauh mana kesepakatan tersebut tetap menghormati prinsip-prinsip dasar kebijakan luar negeri Indonesia (Anwar 2021).

Dalam negosiasi domestik tersebut, munculnya AUKUS memberikan dampak yang cukup signifikan, khususnya terhadap posisi Indonesia. AUKUS merupakan pakta keamanan trilateral antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat yang diumumkan pada tahun 2021 dan mencakup kerja sama pengembangan kapal selam bertenaga nuklir bagi Australia. Di Indonesia, AUKUS memunculkan kekhawatiran mengenai meningkatnya rivalitas geopolitik dan potensi perlombaan senjata di kawasan Indo-Pasifik. Banyak aktor domestik di Indonesia memandang bahwa penguatan kerja sama pertahanan Australia dengan negara-negara Barat dapat mengganggu stabilitas kawasan dan melemahkan prinsip non-blok Indonesia. Dalam perspektif Two-Level Games, isu AUKUS memperbesar tekanan domestik terhadap pemerintah Indonesia sehingga ruang win-set menjadi lebih sempit (Farhan 2024).

Berdasarkan perspektif Two-Level Games, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia berhasil membangun ruang penerimaan domestik atau win-set yang cukup besar terhadap hasil negosiasi DCA. Aktor-aktor domestik utama seperti Kementerian Pertahanan, TNI, dan Kementerian Luar Negeri pada dasarnya dapat menerima substansi kerja sama yang disepakati karena dianggap mampu memberikan manfaat strategis bagi Indonesia tanpa mengorbankan prinsip dasar politik luar negeri nasional. Dengan demikian, keberhasilan Indonesia mencapai kesepakatan DCA dengan Australia tidak hanya ditentukan oleh proses negosiasi di tingkat internasional, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah mengelola dan mengakomodasi kepentingan aktor-aktor

domestik yang terlibat dalam proses pembentukan kebijakan tersebut (Putnam 1988).

Dalam perspektif Two-Level Games Robert Putnam, win-set Indonesia merupakan kumpulan hasil negosiasi internasional yang dapat diterima oleh aktor-aktor domestik Indonesia sekaligus memungkinkan pemerintah mencapai kesepakatan dengan pihak lain pada tingkat internasional (Putnam 1988). Dalam konteks pembentukan DCA Indonesia Australia tahun 2024, keberhasilan tercapainya kesepakatan menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia mampu membangun dukungan domestik yang cukup luas terhadap peningkatan kerja sama pertahanan dengan Australia, sehingga hasil negosiasi tersebut berada dalam ruang win-set Indonesia (Putnam 1988).

Bagi Indonesia, kepentingan utama yang membentuk win-set berasal dari kebutuhan modernisasi pertahanan nasional, peningkatan kapasitas militer, serta upaya menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik yang semakin dinamis. Dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia ditegaskan bahwa pembangunan kekuatan pertahanan diarahkan untuk menghadapi perkembangan lingkungan strategis yang semakin kompleks, termasuk meningkatnya rivalitas kekuatan besar dan berbagai ancaman keamanan non-tradisional (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015). Meningkatnya aktivitas militer di Laut Cina Selatan, kompetisi strategis antara Amerika Serikat dan Tiongkok, serta ancaman seperti terorisme, penyelundupan lintas batas, dan kejahatan maritim mendorong Indonesia untuk memperkuat kerja sama dengan negara-negara mitra strategis, termasuk Australia (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia 2015). Dalam konteks tersebut, DCA dipandang sebagai instrumen yang dapat meningkatkan interoperabilitas,

pendidikan militer, latihan gabungan, pertukaran personel, serta kerja sama teknologi pertahanan tanpa mengurangi kedaulatan nasional (Australian Government Department of Defence, 2024).

Meskipun demikian, ruang win-set Indonesia tidak bersifat tanpa batas. Sejumlah aktor domestik tetap memberikan batasan terhadap bentuk kerja sama yang dapat diterima. Prinsip politik luar negeri bebas aktif yang telah menjadi fondasi kebijakan luar negeri Indonesia mengharuskan pemerintah memastikan bahwa DCA tidak berkembang menjadi aliansi militer formal maupun mengikat Indonesia ke dalam blok keamanan tertentu (Sukma 2011). Selain itu, pengalaman historis hubungan Indonesia–Australia, seperti krisis Timor Timur tahun 1999 dan kasus penyadapan oleh intelijen Australia terhadap pejabat tinggi Indonesia pada tahun 2013, turut membentuk persepsi kehati-hatian di kalangan publik dan sebagian elite politik Indonesia terhadap perluasan kerja sama pertahanan dengan Australia (Weatherbee 2013).

Konsep win-set dalam kerja sama pertahanan DCA (Defense Cooperation Agreement) antara Indonesia dan Australia menggambarkan ruang kemungkinan tercapainya kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua negara, baik pada tingkat internasional maupun domestik. Dalam model ini, Australia ditempatkan sebagai pihak X, sedangkan Indonesia sebagai pihak Y. Kesepakatan hanya dapat tercapai apabila terdapat irisan kepentingan antara kedua negara, yaitu ruang yang masih dapat diterima oleh pemerintah, parlemen, militer, dan opini publik masing-masing negara.

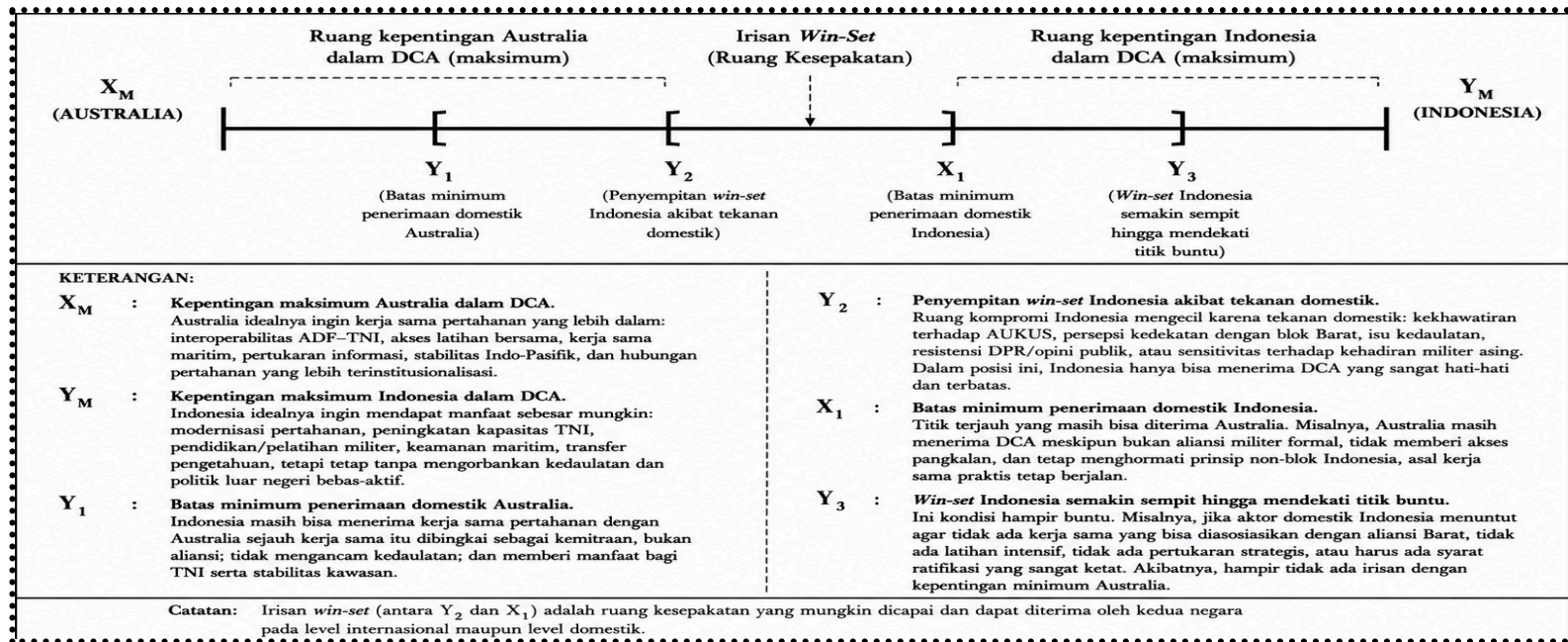
Pada sisi Australia, titik XM menunjukkan kepentingan maksimal Australia dalam DCA. Australia menginginkan kerja sama pertahanan yang lebih mendalam, seperti interoperabilitas antara ADF dan TNI, latihan militer bersama, kerja sama keamanan maritim, pertukaran intelijen, serta penguatan stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Namun, Australia juga memiliki batas minimum penerimaan yang ditunjukkan oleh X1. Artinya, Australia masih dapat menerima kerja sama yang tidak berbentuk aliansi militer formal selama kerja sama strategis dan praktis tetap berjalan.

Sementara itu, pada sisi Indonesia, titik YM menggambarkan kepentingan maksimal Indonesia, yaitu memperoleh manfaat dari kerja sama pertahanan seperti modernisasi alutsista, peningkatan kapasitas TNI, pendidikan dan pelatihan militer, transfer teknologi, serta keamanan maritim. Akan tetapi, Indonesia tetap berusaha menjaga prinsip politik luar negeri bebas aktif dan mempertahankan kedaulatan nasional. Dalam kondisi domestik yang relatif stabil, posisi Indonesia berada pada Y1, yaitu ketika DCA masih dapat diterima karena dipandang sebagai bentuk kemitraan dan bukan aliansi militer.

Ketika tekanan domestik di Indonesia meningkat, ruang kompromi Indonesia mulai menyempit menuju Y2. Penyempitan ini dapat dipengaruhi oleh kekhawatiran terhadap isu AUKUS, dominasi negara Barat, sensitivitas terhadap kehadiran militer asing, serta penolakan dari DPR maupun opini publik. Dalam situasi tersebut, Indonesia hanya dapat menerima bentuk kerja sama yang lebih terbatas dan berhati-hati.

Apabila tekanan domestik semakin kuat hingga mencapai Y_3 , maka win-set Indonesia menjadi sangat sempit dan mendekati titik buntu. Pada kondisi ini, tuntutan domestik dapat membatasi hampir seluruh bentuk kerja sama strategis dengan Australia, sehingga irisan kepentingan dengan Australia menjadi sangat kecil atau bahkan hilang sama sekali. Akibatnya, peluang tercapainya kesepakatan DCA menjadi rendah dan negosiasi berpotensi mengalami kebuntuan.

Gambar 3.2 Pemetaan Win-Set Indonesia dalam DCA Indonesia Australia 2021–2024



Sumber : Robert Putnam (1988)

3.2 Level Internasional dan Domestik Australia dalam DCA

Pada Level I, Australia memandang Indonesia sebagai salah satu mitra strategis terpenting di kawasan Indo-Pasifik. Posisi geografis Indonesia yang berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas kawasan dan keamanan jalur perdagangan internasional. Bagi Australia, stabilitas Indonesia memiliki dampak langsung terhadap keamanan nasional Australia karena kedua negara berbagi lingkungan strategis yang sama serta menghadapi berbagai tantangan keamanan regional yang serupa. Oleh karena itu, memperkuat hubungan pertahanan dengan Indonesia menjadi bagian penting dari strategi keamanan Australia di kawasan Indo-Pasifik (Department of Foreign Affairs and Trade 2024).

Kepentingan Australia dalam DCA juga berkaitan dengan perubahan lingkungan strategis kawasan yang semakin kompetitif. Meningkatnya rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok, perkembangan teknologi pertahanan yang semakin cepat, serta munculnya berbagai ancaman keamanan non-tradisional mendorong Australia untuk memperkuat kemitraan dengan negara-negara kawasan. Dalam dokumen National Defence Strategy 2024, Pemerintah Australia menegaskan pentingnya membangun kemitraan strategis yang lebih erat dengan negara-negara tetangga guna menciptakan lingkungan keamanan yang stabil dan dapat diprediksi. Dalam konteks tersebut, Indonesia dipandang sebagai mitra yang

memiliki posisi sentral dalam menjaga stabilitas Asia Tenggara dan kawasan Indo-Pasifik secara keseluruhan (Australian Government 2024).

Selain mempertimbangkan stabilitas kawasan, Australia juga memiliki kepentingan untuk meningkatkan interoperabilitas antara Australian Defence Force (ADF) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Interoperabilitas menjadi aspek penting dalam kerja sama pertahanan modern karena memungkinkan kedua negara untuk meningkatkan koordinasi, komunikasi, dan efektivitas pelaksanaan berbagai kegiatan keamanan bersama. Melalui DCA, Australia memperoleh kesempatan untuk memperluas latihan militer bersama, meningkatkan pertukaran personel pertahanan, memperkuat kerja sama pendidikan militer, dan mengembangkan mekanisme koordinasi yang lebih efektif dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan regional. mengurangi kewenangan nasional atas strategi pertahanan. (Sebastian & Lanti, 2018).

kepentingan internasional Australia pada Level I harus memperoleh dukungan dari aktor-aktor domestik pada Level II. Pemerintah Australia tidak dapat secara sepihak menjalankan hasil negosiasi internasional apabila kebijakan tersebut tidak memperoleh legitimasi dari institusi domestik yang memiliki pengaruh terhadap proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, keberhasilan Australia dalam mencapai kesepakatan DCA juga dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah mengakomodasi berbagai kepentingan domestik yang berkembang di dalam negeri (Putnam 1988).

Salah satu aktor domestik yang memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan DCA adalah Department of Defence Australia. Sebagai lembaga

yang bertanggung jawab terhadap kebijakan pertahanan nasional, Department of Defence memandang Indonesia sebagai mitra strategis yang penting dalam mendukung keamanan kawasan. Lembaga ini memiliki kepentingan untuk memperluas kerja sama pertahanan dengan Indonesia guna meningkatkan kemampuan operasional ADF, memperkuat interoperabilitas, dan memperluas jaringan kemitraan strategis Australia di kawasan Indo-Pasifik. Dukungan dari Department of Defence menjadi faktor penting yang memperkuat posisi Pemerintah Australia dalam proses negosiasi DCA (Australian Department of Defence 2024).

Selain Department of Defence, Australian Defence Force (ADF) juga memiliki kepentingan langsung terhadap implementasi DCA. Dari perspektif ADF, kerja sama dengan Indonesia memberikan manfaat dalam bentuk peningkatan kemampuan operasional, pengalaman latihan bersama, penguatan koordinasi keamanan maritim, serta peningkatan kesiapan dalam menghadapi berbagai ancaman regional. Kerja sama tersebut memungkinkan ADF untuk membangun hubungan yang lebih erat dengan salah satu kekuatan militer terbesar di Asia Tenggara sehingga mendukung kepentingan strategis Australia dalam jangka panjang (National Defence Strategy 2024).

Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) juga memainkan peran penting dalam proses penerimaan domestik terhadap DCA. Sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan luar negeri Australia, DFAT memandang Indonesia sebagai mitra yang sangat penting dalam kebijakan kawasan Australia. Hubungan yang stabil dan konstruktif dengan Indonesia dipandang dapat mendukung berbagai kepentingan Australia, mulai dari

keamanan regional, perdagangan, hingga kerja sama ekonomi dan diplomatik. Oleh karena itu, DFAT memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa DCA dapat memperkuat hubungan bilateral secara keseluruhan tanpa menimbulkan ketegangan politik maupun persepsi negatif di kawasan (DFAT 2024).

Keterkaitan antara Level I dan Level II Australia menunjukkan bahwa proses pembentukan DCA merupakan hasil interaksi antara kepentingan strategis internasional dan dinamika domestik Australia. Pemerintah Australia berupaya mencapai kesepakatan yang dapat memperkuat posisi strategisnya di kawasan Indo-Pasifik, tetapi pada saat yang sama harus memastikan bahwa kesepakatan tersebut memperoleh dukungan dari institusi domestik yang berkepentingan terhadap keamanan nasional. Dukungan dari Department of Defence, ADF, dan DFAT menunjukkan bahwa substansi DCA sejalan dengan kepentingan strategis Australia sehingga memperbesar peluang keberhasilan negosiasi internasional.

Berdasarkan perspektif Two-Level Games, kondisi tersebut menunjukkan bahwa Australia berhasil menciptakan hubungan yang selaras antara kepentingan internasional dan kepentingan domestik. Kepentingan yang diperjuangkan Australia dalam perundingan DCA memperoleh dukungan dari aktor-aktor domestik utama sehingga membentuk ruang penerimaan yang luas terhadap hasil negosiasi. Dengan demikian, keberhasilan Australia dalam menyepakati DCA dengan Indonesia tidak hanya disebabkan oleh kebutuhan strategis di tingkat internasional, tetapi juga karena adanya dukungan domestik yang memungkinkan pemerintah Australia mengimplementasikan hasil kesepakatan tersebut secara efektif.

Secara keseluruhan, negosiasi domestik dalam DCA menunjukkan bahwa keberhasilan kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Australia sangat dipengaruhi oleh dinamika politik dalam negeri masing-masing negara. Dalam teori Two-Level Games, pemerintah Indonesia dan Australia harus mampu membangun keseimbangan antara kepentingan strategis internasional dan tuntutan domestik. Di Indonesia, isu AUKUS, kedaulatan, dan sensitivitas terhadap aliansi Barat menjadi faktor utama yang mempengaruhi penerimaan domestik terhadap DCA. Sementara itu, Australia perlu memastikan bahwa kerja sama dengan Indonesia tetap mendukung strategi keamanan kawasan dan kepentingan nasionalnya.

Win-set Australia terbentuk dari kombinasi kepentingan strategis pemerintah Australia, kebutuhan keamanan nasional, serta dukungan dari institusi pertahanan dan pembuat kebijakan luar negeri Australia. Dalam beberapa tahun terakhir, Australia menghadapi perubahan lingkungan strategis yang ditandai oleh meningkatnya persaingan geopolitik di kawasan Indo-Pasifik. Situasi tersebut mendorong Canberra untuk memperkuat hubungan keamanan dengan negara-negara Asia Tenggara, terutama Indonesia yang memiliki posisi geografis strategis di jalur penghubung Samudra Hindia dan Pasifik (Australian Government Department of Defence 2024). Dalam kerangka teori Two-Level Games, kondisi ini memperluas ruang win-set Australia karena terdapat dukungan domestik yang cukup kuat terhadap upaya peningkatan kerja sama pertahanan dengan Indonesia sebagai mitra strategis utama di kawasan (Putnam 1988).

Bagi Australia, Indonesia dipandang sebagai mitra yang sangat penting dalam menjaga stabilitas kawasan. Kedekatan geografis kedua negara menjadikan keamanan Indonesia secara langsung berkaitan dengan keamanan nasional Australia. Dalam National Defence Strategy 2024, pemerintah Australia menegaskan bahwa Indonesia merupakan salah satu mitra utama dalam menjaga keamanan dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik (Australian Government Department of Defence 2024). Oleh karena itu, peningkatan kerja sama melalui Defence Cooperation Agreement (DCA) dianggap mampu memperkuat koordinasi keamanan maritim, meningkatkan pertukaran intelijen, memperluas latihan militer bersama, serta memperkuat kemampuan respons terhadap ancaman regional (Department of Foreign Affairs and Trade Australia 2024).

Selain faktor geografis, dinamika pembentukan AUKUS pada tahun 2021 juga memengaruhi preferensi Australia. Meskipun AUKUS meningkatkan kemampuan strategis Australia melalui pengembangan kapal selam bertenaga nuklir dan kerja sama teknologi pertahanan canggih, pemerintah Australia menyadari bahwa munculnya kekhawatiran negara-negara Asia Tenggara terhadap potensi perlombaan senjata dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap kebijakan pertahanannya (Medcalf 2020). Dalam situasi tersebut, memperkuat hubungan pertahanan dengan Indonesia menjadi langkah penting untuk menunjukkan bahwa Australia tetap berkomitmen pada stabilitas kawasan, penghormatan terhadap sentralitas ASEAN, dan kerja sama keamanan yang inklusif (Department of Foreign Affairs and Trade Australia 2024).

Namun demikian, win-set Australia juga memiliki batasan. Pemerintah Australia membutuhkan kerja sama yang lebih mendalam dengan Indonesia tetapi harus tetap menghormati posisi Indonesia sebagai negara yang menjalankan politik luar negeri bebas aktif dan tidak terikat pada aliansi militer tertentu (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia 2024). Australia tidak dapat memaksakan agenda yang mengarah pada pembentukan aliansi militer formal karena berpotensi menimbulkan resistensi dari Indonesia dan menghambat tercapainya kesepakatan.

Dalam perspektif Two-Level Games, kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan negosiasi bergantung pada kemampuan pemerintah Australia untuk menyesuaikan kepentingan strategisnya dengan batas penerimaan domestik Indonesia (Putnam 1988). Dengan demikian, win-set Australia mencakup kerja sama pertahanan yang lebih erat, peningkatan interoperabilitas militer, penguatan koordinasi keamanan regional, serta kerja sama keamanan maritim dan penanggulangan ancaman non-tradisional, selama kerja sama tersebut tidak bertentangan dengan prinsip kedaulatan dan kebijakan luar negeri Indonesia (Australian Government Department of Defence 2024). antara agenda Indonesia dan Australia yang berbeda-beda pun menjadi proses interaksi internasional antara kedua negara

Pemetaan win-set Australia dalam Defence Cooperation Agreement (DCA) Indonesia–Australia 2021–2024 menunjukkan bagaimana pemerintah Australia harus menyeimbangkan kepentingan strategis di tingkat internasional dengan berbagai tekanan politik dan institusional di tingkat domestik. Dalam

perspektif Two-Level Games yang dikemukakan oleh Robert Putnam (1988), keberhasilan suatu perjanjian internasional tidak hanya ditentukan oleh hasil negosiasi antarnegara pada Level I (internasional), tetapi juga oleh kemampuan pemerintah memperoleh dukungan dari aktor domestik pada Level II. Oleh karena itu, ruang win-set Australia menggambarkan rentang kebijakan yang masih dapat diterima oleh pemerintah, parlemen, institusi pertahanan, serta opini publik Australia dalam kerja sama pertahanan dengan Indonesia.

Pada pemetaan ini, posisi YM merepresentasikan kepentingan maksimal Australia dalam DCA. Australia menginginkan kerja sama pertahanan yang sedalam mungkin dengan Indonesia karena Indonesia memiliki posisi strategis di kawasan Indo-Pasifik dan berada pada jalur komunikasi laut yang sangat penting bagi kepentingan keamanan Australia. Dalam posisi maksimal tersebut, Australia berupaya memperluas interoperabilitas antara Australian Defence Force (ADF) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI), meningkatkan latihan militer bersama, memperkuat kerja sama keamanan maritim, memperluas pertukaran informasi strategis dan intelijen, serta memperkuat stabilitas kawasan Indo-Pasifik sebagai bagian dari kepentingan keamanan nasional Australia. Kepentingan ini sejalan dengan strategi pertahanan Australia yang menempatkan Asia Tenggara sebagai kawasan prioritas dalam menjaga keamanan regional dan kebebasan navigasi maritim.

Sementara itu, titik Y1 menggambarkan batas minimum penerimaan domestik Australia yang masih relatif luas. Pada posisi ini, berbagai aktor domestik Australia masih memberikan dukungan terhadap kerja sama pertahanan

dengan Indonesia selama kerja sama tersebut mampu meningkatkan keamanan kawasan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional Australia. Dukungan dari Kementerian Pertahanan Australia, ADF, kalangan birokrasi keamanan, dan sebagian besar elit politik memperluas win-set Australia sehingga pemerintah memiliki ruang negosiasi yang cukup besar dalam mencapai kesepakatan dengan Indonesia. Menurut Putnam (1988), semakin besar win-set suatu negara maka semakin besar pula kemungkinan tercapainya kesepakatan internasional karena terdapat lebih banyak alternatif kebijakan yang dapat diterima oleh aktor domestik.

Namun demikian, ruang kompromi Australia tidak selalu berada pada kondisi yang luas. Titik Y2 menunjukkan kondisi ketika win-set Australia mulai mengalami penyempitan akibat meningkatnya tekanan domestik. Penyempitan tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti keterbatasan anggaran pertahanan, prioritas keamanan lain yang lebih mendesak, fokus strategis terhadap implementasi AUKUS, serta kebutuhan untuk memastikan bahwa setiap kerja sama internasional memberikan manfaat yang nyata bagi keamanan nasional Australia. Dalam situasi ini, pemerintah Australia tetap mendukung DCA, tetapi ruang negosiasi yang tersedia menjadi lebih terbatas karena setiap kebijakan harus memperoleh legitimasi dari berbagai institusi domestik. Sebagaimana dijelaskan oleh Milner (1997), tekanan domestik dapat memperkecil ukuran win-set suatu negara sehingga ruang kompromi dalam negosiasi internasional menjadi semakin sempit.

Di sisi lain, titik X1 merepresentasikan batas minimum penerimaan domestik Indonesia yang masih dapat diterima oleh Australia. Pada titik ini, Australia memahami bahwa Indonesia memiliki sejumlah batasan domestik yang tidak dapat dilanggar, terutama terkait prinsip politik luar negeri bebas aktif, kedaulatan nasional, dan penolakan terhadap pembentukan aliansi militer formal. Oleh karena itu, Australia masih dapat menerima bentuk kerja sama yang tidak memberikan akses pangkalan militer permanen, tidak menempatkan pasukan asing secara tetap di wilayah Indonesia, serta tetap menghormati prinsip non-blok yang menjadi dasar kebijakan luar negeri Indonesia. Pemahaman Australia terhadap batas penerimaan Indonesia inilah yang memungkinkan terciptanya ruang kompromi dalam DCA.

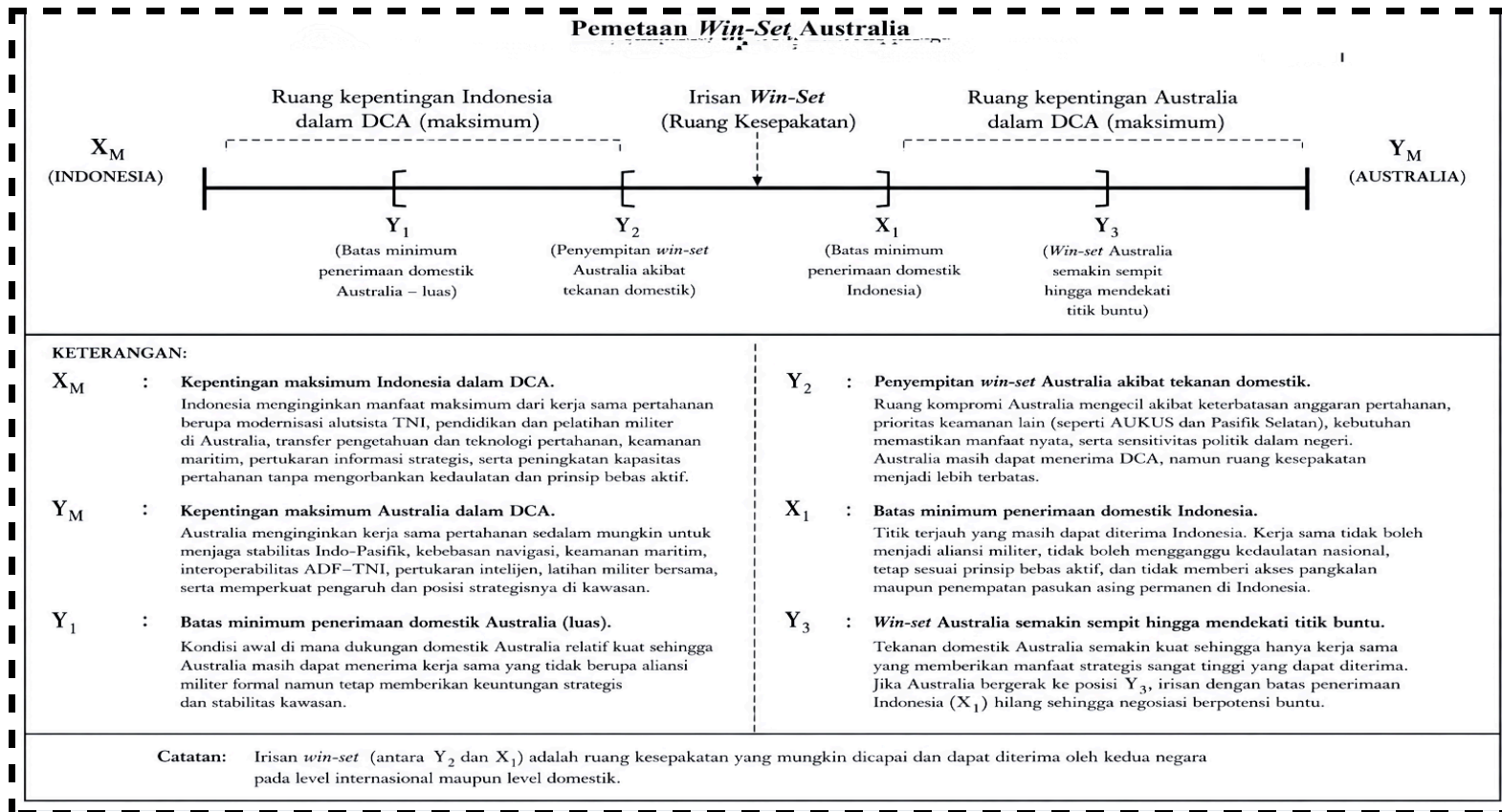
Selanjutnya, titik Y3 menunjukkan kondisi ketika win-set Australia semakin sempit hingga mendekati titik buntu (deadlock). Pada posisi ini, tekanan domestik Australia menjadi sangat kuat sehingga pemerintah hanya dapat menerima kerja sama yang memberikan keuntungan strategis yang sangat tinggi. Jika Australia bergerak terlalu jauh menuju posisi Y3, maka ruang irisan dengan kepentingan Indonesia akan semakin mengecil bahkan berpotensi hilang. Kondisi tersebut dapat menyebabkan kegagalan ratifikasi atau hambatan implementasi perjanjian karena tidak lagi terdapat ruang kompromi yang dapat diterima oleh kedua negara.

Berdasarkan pemetaan tersebut, irisan win-set berada pada rentang antara Y2 dan X1. Area ini merupakan ruang kesepakatan yang dapat diterima oleh Australia maupun Indonesia baik pada tingkat internasional maupun domestik.

Dalam ruang inilah DCA berhasil menemukan titik temu kepentingan kedua negara. Bentuk kerja sama yang berada dalam area win-set meliputi latihan militer bersama, peningkatan interoperabilitas antara ADF dan TNI, pendidikan dan pelatihan personel militer, kerja sama keamanan maritim, pertukaran informasi strategis, bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana, serta penguatan diplomasi pertahanan tanpa membentuk aliansi militer formal.

Kesamaan kepentingan tersebut menunjukkan adanya konvergensi antara kebutuhan Australia untuk menjaga stabilitas Indo-Pasifik dan kebutuhan Indonesia untuk meningkatkan kapasitas pertahanan nasional tanpa mengorbankan prinsip bebas aktif. Dengan demikian, keberhasilan DCA Indonesia–Australia dapat dijelaskan melalui konsep win-set dalam teori Two-Level Games. Pemerintah Australia mampu menyesuaikan kepentingan strategisnya dengan batas penerimaan domestik Indonesia, sementara Indonesia memperoleh manfaat kerja sama pertahanan tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip dasar kebijakan luar negerinya.

Gambar 3.3 Pemetaan Win-Set Australia dalam DCA Indonesia Australia 2021–2024



Sumber : Robert Putnam (1988)

BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Australia melalui Defence Cooperation Agreement (DCA) merupakan bentuk kemitraan strategis yang berkembang dalam merespons dinamika keamanan kawasan Indo-Pasifik. Perjanjian ini tidak hanya memperkuat hubungan bilateral kedua negara, tetapi juga berkontribusi terhadap stabilitas regional melalui peningkatan interoperabilitas militer, kerja sama keamanan maritim, serta penanggulangan ancaman non-tradisional seperti terorisme dan kejahatan lintas negara. DCA juga mencerminkan transformasi hubungan Indonesia Australia yang semakin stabil dan berbasis pada kepentingan bersama.

DCA menunjukkan bagaimana interaksi antara level domestik dan internasional menentukan kebijakan luar negeri dari sudut pandang teori Two-Level Games. Untuk menangani isu-isu keamanan regional, Indonesia dan Australia berupaya mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dalam skala global. Namun, pada tingkat domestik, pemerintah Indonesia harus mempertimbangkan sejumlah hal, termasuk peran aktor domestik seperti Dewan Perwakilan Rakyat dan Tentara Nasional Indonesia, sensitivitas terhadap isu-isu kedaulatan, serta konsep kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif. Akibatnya, Indonesia hanya dapat terlibat dalam upaya kerja sama yang tidak berujung pada aliansi militer formal.

Konsep “win-set” sangat penting untuk memahami mengapa kerja sama ini berhasil. Latihan militer bersama, pertukaran personel, dan kerja sama keamanan maritim merupakan contoh kerja sama yang fleksibel yang telah berhasil diidentifikasi oleh Indonesia dan Australia sebagai bidang-bidang kepentingan bersama. Pencapaian ini menunjukkan bahwa kedua negara mampu mencapai kesepakatan strategis yang saling menguntungkan meskipun terdapat perbedaan kepentingan dan keterbatasan internal. Oleh karena itu, dalam konteks Two-Level Games, DCA dapat dipandang sebagai hasil dari upaya menyeimbangkan tuntutan domestik dan kepentingan global.

Secara keseluruhan, Indonesia telah memperoleh manfaat dari DCA melalui penguatan posisi strategisnya di kawasan Indo-Pasifik serta peningkatan kemampuan pertahanannya. Namun, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, terutama terkait kebutuhan untuk menjaga keseimbangan dalam hubungan luar negeri dan sensitivitas lokal. Oleh karena itu, kemampuan Indonesia untuk menangani secara bersamaan berbagai faktor lokal dan internasional sangatlah penting bagi keberhasilan DCA.

4.2 Rekomendasi

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas kajian secara lebih spesifik tentang implementasi DCA di lapangan, misalnya melalui studi kasus mengenai latihan militer bersama, kerja sama keamanan maritim, atau program pertukaran personel militer. Kajian yang lebih terfokus ini akan membantu dalam mengevaluasi efektivitas kerja sama serta mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. dan juga memperluas perkembangan kerja sama antara Indonesia dan Australia yang dimana akan banyak sekali perjanjian berkelanjutan di masa depan.

Serta mengembangkan kajian mengenai kerja sama keamanan Indonesia dan Australia secara lebih komprehensif. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, terutama dalam penggunaan data dan pendekatan analisis yang bersifat kualitatif deskriptif, sehingga membuka peluang bagi penelitian lanjutan untuk memperdalam dan memperluas kajian yang telah dilakukan. sistematika rekomendasi Anda di sini.

DAFTAR PUSTAKA

- Artha Setya Anggara. 2024. "DIPLOMACY AND GLOBAL SECURITY JOURNAL Jurnal Mahasiswa Magister Hubungan Internasional." KEPENTINGAN INDONESIA DALAM KERJA SAMA PERTAHANAN DENGAN PRANCIS TAHUN 2020-2024 1 (No 1): 577-593.
- Aryojati, Ardipanto. 2023. RENCANA DEFENCE COOPERATION AGREEMENT ANTARA INDONESIA DAN AUSTRALIA, 203.
- Dougherty, James E., and Robert L. Pfaltzgraff. 1997. Contending theories of international relations: a comprehensive survey. N.p.: Longman.
- Nugraheni, Indrawati. 2023. Pengaruh Penandatanganan Defence Cooperation Agreement (DCA) oleh pemerintah Indonesia dengan prancis terhadap perkembangan industri pertahanan di Indonesia, (January).
- Robert, Putham D. 1998. "International Organization." Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two Level Game.
- Sahputra, Dewi D. 2024. Kerjasama Indonesia dengan Amerika Serikat dalam Peningkatan Pertahanan Udara Nasional Indonesia 10:306-320.
- Banyu Perwira, Anak A. 2017. Pengantar ilmu hubungan internasional. N.p.: PT Remaja Rosdakarya.
- Dougherty, James E., and Robert L. Pfaltzgraff. 1997. Contending theories of international relations: a comprehensive survey. N.p.: Longman.
- Indo-Pacific Defence Forum. 2021. Australia dan Indonesia meningkatkan kerja sama kontraterorisme dan keamanan siber.
- Kemhan. 2021. Menhan RI dan Menhan Australia Bahas Kerjasama Pertahanan.
- Kemhan. 2024. "KEMENTERIAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA." Menhan Prabowo Tanda Tangan Perjanjian Kerja Sama Pertahanan RI-Australia di Akmil Magelang.
- Penhumas akmil. 2024. Menteri Pertahanan Indonesia dan Australia Tanda Tangan Perjanjian Kerja Sama Pertahanan.
- Rizki, Roza. 2021. "INFO SINGKAT BIDANG HUBUNGAN INTERNASIONAL." PENGUATAN HUBUNGAN INDONESIA-AUSTRALIA UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DI INDO-PASIFIK XIII (no.18).
- 70 years indonesia australia. n.d. "Operation Alliance." 70 years indonesia australia.

<https://www.70yearsindonesiaaustralia.com/kerja-sama-antara-australia-dan-indonesia/operation-alliance-nab5z>.

Alan, Dupont. 1996. *The Australian-Indonesia Security Agreement*. 68th ed. 2 vols. N.p.: The Australian Quarterly.

BPMI Setpres. 2025. "PM Albanese: Australia dan Indonesia Perkuat Komitmen Perdamaian dan Stabilitas Kawasan melalui Perjanjian Keamanan Baru." Presiden RI. <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/pm-albanese-australia-dan-indonesia-perkuat-komitmen-perdamaian-dan-stabilitas-kawasan-melalui-perjanjian-keamanan-baru/>.

Connery D. 2008. "Crisis Policymaking : Australia and the East Timor Crisis of 1999."

Edna Caroline, Pattisna. 2024. "Kerja sama RI-Australia ditingkatkan, Prabowo: Jaga stabilitas Asia Pasifik." *kompas.id*. <https://www.kompas.id/artikel/saling-menghormati-kepentingan-nasional-australia-indonesia>.

Hugh White. 2007. "The Lombok Treaty and Beyond." *Australia-Indonesia Relations*.

Keating R. 1995. "The office of the Prime Minister of Australia." *Australia-Indonesia on Maintaining Security Press*, (December).

Kedutaan Besar Australia Indonesia. 2009. "Bantuan Australia untuk Aceh." Kedutaan Besar Australia Indonesia. https://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/SM09_092.html.

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. 2008. "Perjanjian Keamanan RI-Australia Resmi Berlaku." Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. https://www.setneg.go.id/baca/index/perjanjian_keamanan_ri_australia_resmi_berlaku.

Kemhan. 2024. "Kementerian Pertahanan Republik Indonesia." Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. <https://www.kemhan.go.id/2024/08/20/pernyataan-bersama-tingkat-menteri-tentang-kerja-sama-pertahanan-australia-indonesia.html>.

Kemhan. 2024. "Kementerian Pertahanan Republik Indonesia." Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. <https://www.kemhan.go.id/2024/08/29/menhan-prabowo-tanda-tangani-perjanjian-kerja-sama-pertahanan-ri-australia-di-akmil-magelang.html>.

Kick News. 2021. "Mengenal perjanjian Traktat Lombok 2006 antara Indonesia dan Australia sepakat tidak perang." Kick News. <https://kicknews.today/mengenal-perjanjian-traktat-lombok-2006-antara-indonesia-dan-australia-sepakat-tidak-perang/>.

Kompasiana. 2023. "Mengenal Kerja Sama Defence Cooperation Agreement dan Profitnya bagi Indonesia." <https://www.kompasiana.com/mtsadewa/64b10a6b4addee337122fe12/mengenal-kerja-sama-defence-cooperation-agreement-dan-profitnya-bagi-indonesia>.

- Lombok Treaty, 2006 — 70 years Indonesia-Australia.” 2019. 70 years Indonesia-Australia.
<https://www.70yearsindonesiaaustralia.com/kerja-sama-antara-australia-dan-indonesia/lombok-treaty-2006>.
- Mandasari, Jayanti Retno Mandasari R. 2025. “Perjanjian Keamanan Baru Australia-Indonesia, Pakar: Demi Kepentingan Bersama.” Radio Republik Indonesia.
<https://rri.co.id/internasional/1971586/perjanjian-keamanan-baru-australia-indonesia-pakar-demi-kepentingan-bersama>.
- Minister for Foreign Affairs. 2025. “Statement on Australia-Indonesia Treaty on Common Security | Australian Minister for Foreign Affairs.” Minister for Foreign Affairs.
<https://www.foreignminister.gov.au/minister/penny-wong/media-release/statement-australia-indonesia-treaty-common-security>.
- Mohamad Final Daeng. 2024. “RI-Australia Sign Defense Cooperation Agreement, Prabowo: Historic Milestone.” Kompas indonesia.
<https://www.kompas.id/artikel/en-ri-australia-teken-perjanjian-kerja-sama-pertahanan-prabowo-tonggak-bersejarah>.
- Paul, Toohey. 2014. Inside the Sovereign Borders Turn-back Lifeboat.
<http://www.news.com.au>.
- Prabowo, Subianto. 2025. “Prabowo–Albanese Teken Kesepakatan Bersejarah Demi Stabilitas Indo-Pasifik.”
<https://prabowosubianto.com/prabowo-albanese-teken-kesepakatan-bersejarah-demi-stabilitas-indo-pasifik/>.
- RMOL. 2025. “Makna Baru Perjanjian Keamanan Indonesia-Australia.” RMOL.
<https://rmol.id/publika/read/2025/11/22/687632/makna-baru-perjanjian-keamanan-indonesia-australia>.
- Sukma R. 1999. Indonesia and Australia : The Politics of a Security Agreement.
- Taylor, Brendan. n.d. Australia as an Asia-Pacific regional power friendship in Flux ?, 110.
- Maulana, M. Z. 2024. Kepentingan Australia dalam Kerja Sama Keamanan Maritim terhadap Indonesia melalui Treaty on Defence Cooperation. (Global Insight Journal.)
- Novita, A. A. D., Pedrason, R., & Duarte, E. (2024). Diplomasi Pertahanan Indonesia–Australia: Mengintegrasikan Latihan Militer, Bantuan Kemanusiaan dan Penanggulangan Bencana. *Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*)
- Darmawan, W., Setiabudi, R. W., & Akim. (2024). Political Dynamics of Indonesia-Australia Defence Cooperation: Navigating Geopolitical Challenges in the Indo-Pacific. *Research Journal in Advanced Humanities*
- Haura, S., Angelica, M., Sumala, J., Yulianti, S. I., & Aji, M. P. (2025). Advancing National Defense Diplomacy Through the Indonesia-Australia Defence Cooperation Agreement. *Mandala: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*

- Putnam, R. D. (1988). Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games. *International Organization*, 42(3), 427–460.
- Milner, H. V. (1997). *Interests, Institutions, and Information: Domestic Politics and International Relations*. Princeton University Press
- Fitriyan, J. (2024). Analisis Kepentingan Pertahanan Australia dalam Peningkatan Kerja Sama Militer dengan Indonesia Tahun 2021–2024. *Diplomacy and Global Security Journal*.)
- Haura, S., Angelica, M. D. C., Sumala, J., Yulianti, S. I., & Aji, M. P. (2025). Bureaucratic Analysis of Indonesia's Ministry of Defence: Advancing National Defense Diplomacy through the Indonesia–Australia Defence Cooperation Agreement. *Mandala: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*.)
- Littlejohn, A. (2026). Penguatan kerjasama Australian Defence Force–Tentara Nasional Indonesia dalam menghadapi ancaman multi-domain kawasan Indo-Pasifik. *Centurion MSPD Journal*.)
- Darmawan, W., Setiabudi, R. W., & Akim. (2024). Political dynamics of Indonesia-Australia defence cooperation: Navigating geopolitical challenges in the Indo-Pacific. *Research Journal in Advanced Humanities*.
- Fitriyan, J. (2024). Analisis kepentingan pertahanan Australia dalam peningkatan kerja sama militer dengan Indonesia tahun 2021–2024. *Diplomacy and Global Security Journal*.
- Haura, S., et al. (2025). Bureaucratic analysis of Indonesia's Ministry of Defence in the Indonesia–Australia DCA. *Mandala: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*.
- Maulana, M. Z. (2024). Kepentingan Australia dalam kerja sama keamanan maritim terhadap Indonesia. *Global Insight Journal*.
- Sudirman, A., Djuyandi, Y., & Pratama, F. S. G. (2022). Understanding the dynamics of defense industry cooperation within the framework of the Indonesia–Australia Defense Security Dialogue. *Journal of Political Issues*.
- Novita, A. A. D., Pedrason, R., & Duarte, E. (2024). Diplomasi pertahanan Indonesia–Australia. *Syntax Imperatif Journal*.
- Saputro. (2024). Peluang dan tantangan kerjasama Indonesia–Australia pasca AUKUS. *Indonesian Perspective*.
- Laksmana, E. A. (2019). Reshaping Indonesia's defense diplomacy. *Contemporary Southeast Asia*.
- Rüland, J. (2017). Indonesia's foreign policy and ASEAN: domestic politics and regional leadership. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*.

- Sebastian, L. C., & Lanti, I. (2018). The politics of military reform in post-Suharto Indonesia. *Asian Security*.
- Mietzner, M. (2020). Authoritarian innovations in Indonesia: electoral narrowing and political opposition. *Democratization*.
- Anwar, D. F. (2021). Indonesia and the ASEAN outlook on the Indo-Pacific. *International Affairs*.
- Anwar, Dewi Fortuna. 2021. "Indonesia and the Indo-Pacific: A Pragmatic Foreign Policy." *International Affairs* 97 (1): 111–129.
- Darmawan, Wawan, R. W. Setiabudi, dan Akim. 2025. "Political Dynamics of Indonesia–Australia Defence Cooperation." *Research in Globalization*.
- He, Baogang, dan Mark Beeson. 2017. "Hegemonic Transition and East Asia." *Asian Perspective* 41 (2): 197–219.
- Laksmiana, Evan A. 2019. "Reshaping Indonesia's Defense Diplomacy." *Contemporary Southeast Asia* 41 (2): 254–278.
- Milner, Helen V. 1997. *Interests, Institutions, and Information*. Princeton: Princeton University Press.
- Moravcsik, Andrew. 1993. "Integrating International and Domestic Theories of International Bargaining." *International Organization* 47 (1): 3–42.
- Singh, Bilveer. 2018. "Indonesia–Australia Security Cooperation." *Asian Security* 14 (2): 123–140.
- Darmawan, W., Setiabudi, R. W., & Akim. (2025). Political dynamics of Indonesia–Australia defence cooperation in the Indo-Pacific. *Research in Globalization*.
- Singh, B. 2018. Indonesia–Australia security cooperation and strategic trust. *Asian Security*, 14(2), 123–140.
- Putnam, R. D. 1988. Diplomacy and domestic politics: The logic of two-level games. *International Organization*, 42(3), 427–460.
- Farhan, Cikal Jalu Ghazy. 2024. "AUKUS: A Manifestation of Balance of Power in the Indo-Pacific Region." *Politeia: Journal of Public Administration and Political Science and International Relations* 2 (4). <https://doi.org/10.61978/politeia.v2i4.406>
- Putnam, Robert D. 1988. "Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of

Two-Level Games.” *International Organization* 42 (3): 427–460.
<https://doi.org/10.1017/S0020818300027697>

Raymond, Gregory Vincent. 2018. “Two-Level Games and Australia’s Defence Procurement: The Case of Land-Based Anti-Ship Missiles.” *Asia and the Pacific Policy Studies* 5 (2): 347–361. <https://doi.org/10.1002/app5.225>

Silalahi, Alma Evelinda, and Yazid Bustomi. 2023. “The Construction of an Ideal Indonesian Foreign Policy in Response to the AUKUS Defense Pact.” *International Journal of Global Community* 6 (1).
<https://doi.org/10.33473/ijgc-ri.v6i1-March.144>

Adamy, Muhammad Ilham Ramandha. 2022. “AUKUS and Australia’s Nuclear-Powered Submarine: A Reinforced Strategic Culture.” *Jurnal Hubungan Internasional* 15 (1). <https://doi.org/10.20473/jhi.v15i1.33817>